

LEMBAR PENGESAHAN

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
PADA ANAK JALANAN DI KOTA MALANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Avis Reza Pahlafi
145120600111023

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada tanggal 9 Juli 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji



Restu Karlina Rahayu S.IP.,M.Si
NIP. 198308172015042002
Anggota Majelis Penguji 1



Tia Subekti S.IP.,M.A
NIP. 199206202018032001
Anggota Majelis Penguji 2



Fathur Rahman S.IP.,M.A
NIK. 2011098204291001



Laode Machdani Afala S.IP.,M.A
NIK. 2016078703181001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo., SE., M.Si, Ak
NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN

Nama: Avis Reza Pahlafi

NIM: 145120600111023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2016" adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yang Memberi Pernyataan,



Avis Reza Pahlafi
145120600111023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
PADA ANAK JALANAN DI KOTA MALANG TAHUN 2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

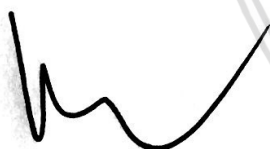
Avis Reza Pahlafi

NIM 145120600111023

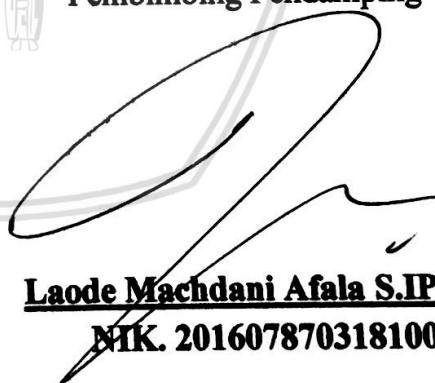
Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Fathur Rahman S.IP.,M.A
NIK. 2011098204291001



Laode Machdani Afala S.IP.,M.A
NIK. 2016078703181001

REPOSITORY.UB.AC.ID

**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PADA ANAK JALANAN DI KOTA MALANG
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh:

Avis Reza Pahlafi
145210600111023



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**



LEMBAR PERSETUJUAN

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

PADA ANAK JALANAN DI KOTA MALANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Avis Reza Pahlafi

NIM 145120600111023

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Fathur Rahman S.IP.,M.A
NIK. 2011098204291001

Laode Machdani Afala S.IP.,M.A
NIK. 2016078703181001



LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
PADA ANAK JALANAN DI KOTA MALANG TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Avis Reza Pahlafi
145120600111023**

**Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada tanggal 9 Juli 2018**

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Restu Karlina Rahayu S.IP.,M.Si
NIP. 198308172015042002
Anggota Majelis Penguji 1

Tia Subekti S.IP.,M.A
NIP. 199206202018032001
Anggota Majelis Penguji 2

Fathur Rahman S.IP.,M.A
NIK. 2011098204291001

Laode Machdani Afala S.IP.,M.A
NIK. 2016078703181001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof.Dr. Unti Ludigdo., SE.,M.Si,Ak
NIP.196908141994021001

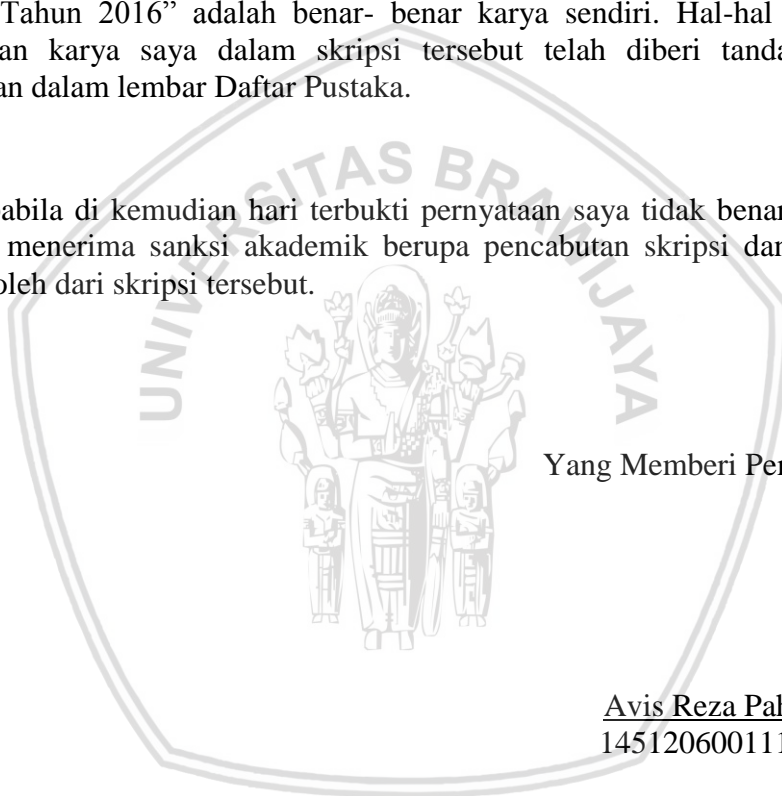
PERNYATAAN

Nama: Avis Reza Pahlafi

NIM: 145120600111023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2016” adalah benar- benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Yang Memberi Pernyataan,

Avis Reza Pahlafi
145120600111023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan atas rahmat dan nikmat yang ALLAH SWT limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2016.” Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian penulis telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhumah Eny Aprillia dan Bapak Sugiono selaku ibu bapak kandung saya yang menjadi salah satu penyemangat dan alasan utama saya dalam penyelesaian skripsi ini. Berkat doa dan dukungan baik moril maupun materil dari beliau beliaunya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Beliau merupakan salah satu karunia terindah yang diberikan Tuhan pada Avis.
2. Eka Candra Setiawan kakak sulung saya, adik saya Gia Iftita Saviera, Ibu Tiri saya Muliana dan Adik Tiri saya Bima yang menjadi salah satu penyemangat saya dalam penyelesaian skripsi ini. Berkat beliau-beliaunya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Fathur Rahman,S.IP,M.A atau Pak Fathur selaku dosen pembimbing utama saya. Pak Fathur merupakan dosen pembimbing terbaik yang selalu saya reportkan ketika mulai awal sampai dengan akhir kepenulisan skripsi ini. Namun beliaunya tetap sabar membimbing,mengarahkan dan memberikan masukan saya sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Pak Fathur menjadi salah sosok yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Laode Machdani Afala S.IP M.A atau Pak Dani sebagai dosen pembimbing kedua saya. Pak Dani merupakan dosen pembimbing yang juga selalu saya reportkan dalam penulisan skripsi ini. Namun beliaunya

tetap sabar membimbing dan memberi masukan saya sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

5. Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si dan Tia Subekti S.IP M.A atau Bu Tia dan Bu Restu sebagai dosen yang telah menyempatkan hadir sebagai penguji yang telah banyak memberi masukan dan rekomendasi yang sangat bagus untuk kualitas skripsi saya agar semakin baik.
6. Bani Radjak Family terutama untuk Mbak Intan dan Mbak Antik sekeluarga, terimakasih atas dukungannya selama ini membantu menguatkan Avis dalam proses perkuliahan ini.
7. Pepet dan Pentil yang sudah sangat baik dan banyak membantu saya meskipun tidak langsung. Memberikan kenyamanan dalam keseharian.
8. Idris, Chikita dan Puspa yang sudah menjadi teman terbaik saya mulai dari saya menjadi mahasiswa baru di Malang. Mereka menjadi salah satu sosok banyak saya repotkan namun selalu ada untuk mendukung dan banyak membantu saya dalam berbagai hal salah satunya mulai dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman yang sudah saya repotkan untuk persiapan ujian skripsi Intan, Tria dan Indira yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendampingi saya.
10. Sahabat “Tambal Sulam” yang sama-sama berjuang mulai dari awal sampai dengan satu persatu dari kita dapat menyelesaikan skripsi. Mereka menjadi salah satu sosok yang selalu ada untuk Avis



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada perkembangan terkait kajian Ilmu Pemerintahan utamanya terkait dengan Penanganan Anak Jalanan.

Malang, 9 Juli 2018

Avis Reza Pahlafi



ABSTRACT

Avis Reza Pahlafı, Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, 2018, The handling of the disabled, social welfare Problem (PMKS) street children in the city of Malang In 2016. Supervisor Team : Fathur Rachman S.IP M.A and Laode Machdani Afala S.IP M.A

Street children are children below age who spent most of his time to working in the streets who do not get a decent life and must fight for his life on the streets. To see how the handling of the disabled, social welfare problem (PMKS) street children in the city of Malang using theory of governance. In the theory of governance there are 4 stages in the achievement of the goal of governance, namely, the selection of objectives, reconciliation and coordination, implementation and feedback on accountability. Methods used in penilitian i.e. Qualitative descriptive. The results of this study showed that the handling of the disabled, social welfare problem (PMKS) street children consists of three actors include Government Social Service namely Malang, a social institution, namely Humanitarian Network in East Java and the private actors Bank Indonesia of Malang. The actor's third analyzed responses through activities conducted. in a study of governance steps that do not yet reflect good governance because despite the actor's third involvement in the handling of street children is not fully network. the success of handling not only numbers but an achievement of sustainability of the actions that should be undertaken consistent handling by the Government. The analysis is carried out based on the realization of Employment Indicators contained in the report of the performance accountability of government agencies Social Service of Malang year 2016 (LAKIP).

Keywords : Street Child, The disabled social welfare Issues, Malang.

ABSTRAK

Avis Reza Pahlafi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan di Kota Malang Pada Tahun 2016. Dosen Pembimbing: Fathur Rachman, S.IP, M.A dan Laode Machdani Afala, S.IP., M.A

Anak Jalanan adalah anak-anak dibawah umur yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan yang tidak mendapatkan kehidupan anak yang layak serta harus memperjuangkan hidupnya di jalanan. Untuk melihat bagaimana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Anak Jalanan di Kota Malang menggunakan teori *governance*. Dalam teori *governance* terdapat 4 tahap dalam pencapaian tujuan *governance* yaitu, Pemilihan Tujuan, Rekonsiliasi dan Koordinasi, Implementasi dan Umpan Balik Akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Anak Jalanan terdiri dari tiga aktor meliputi Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Malang, Lembaga Sosial yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dan aktor swasta yaitu Bank Indonesia Kota Malang. Ketiga aktor tersebut dianalisis penanganannya melalui kegiatan yang dilakukan dalam studi *governance* langkah yang dilakukan belum mencerminkan *good governance* karena meski terlibatnya ketiga aktor tersebut dalam penanganan Anak Jalanan belum sepenuhnya berjejaring. keberhasilan penanganan tidak hanya sebuah pencapaian angka namun keberlanjutan dari tindakan penanganan itu harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Analisis yang dilakukan berdasarkan Realisasi Indikator Kerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016 (LAKIP).

Kata Kunci : Anak Jalanan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) , Kota Malang

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15
2.3 Anak Jalanan	18
2.4 Teori <i>Governance</i>	21
2.5 Alur Pemikiran Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Jenis Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5.1 Wawancara.....	28
3.5.2 Dokumentasi	30



3.5.3 Studi Pustaka.....	31
3.6 Teknis Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	33
4.1 Gambaran Kota Malang	33
4.2 Gambaran Dinas Sosial Kota Malang	34
4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	35
4.4 Keadaan PMKS Kota Malang Pada Tahun 2016	36
4.5 Keadaan Anak Jalanan Kota Malang Tahun 2016	38
4.5.1 Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang.....	41
BAB V PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG PADA TAHUN 2016	43
5.1 Persamaan Visi Misi Instansi	44
5.1.1 Tujuan, Visi, dan Misi Dinas Sosial Kota Malang	44
5.1.2 Tujuan, Visi dan Misi Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur.....	45
5.1.3 Tujuan, Visi dan Misi Bank Indonesia Malang.....	46
5.1.3.1 Program CSR “Dedikasi Untuk Negeri”	49
5.2 Koordinasi dalam Penanganan Anak Jalanan	49
5.2.1 Koordinasi Antar SKPD Kota Malang	50
5.2.2 Koordinasi Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Sosial Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur	52
5.2.3 Koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia Kota Malang.....	56
5.3 Implementasi	59
5.3.1 Penjaringan Anak Jalanan di Kota Malang.....	59
5.3.2 Bantuan Sosial	62
5.3.2.1 Program Desaku Menanti Kota Malang	65
5.3.3 Pembelajaran serta Pelatihan Anak Jalanan.....	66
5.4 Akuntabilitas dan Umpan Balik	72
5.5 Faktor Pendukung.....	78
5.6 Faktor Penghambat.....	80
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan Kota Malang dari 2011-2016.....	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Daftar Narasumber.....	30
Tabel 4.1 Rekapitulasi PMKS Kota Malang tahun 2016.....	37
Tabel 5.1 Rekapitulasi Program CSR Bank Indonesia tahun 2016	47
Tabel 5.2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang	54
Tabel 5.3 UPT Rehabilitasi Sosial Anak Milik Provinsi Mitra Dinas Sosial	67
Tabel 5.4 Capaian Misi dan Sasaran I Dinas Sosial Kota Malang Bidang Sosial Tahun 2016	74
Tabel 5.5 Perbandingan Capaian Misi dan Sasaran I Dinas Sosial Kota Malang Bidang Sosial Tahun 2014-2016	75
Tabel 5.6 Capaian Misi dan Sasaran II Dinas Sosial Kota Malang Bidang Sosial Tahun 2016	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Operasi Penjaringan Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	61
Gambar 5.2 Suasana Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah Belajar Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur di daerah Muharto Gg V	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran Penelitian..... 24



DAFTAR SINGKATAN

Anjal	: Anak Jalanan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<i>Call centre</i>	: Sebuah nara hubung terpusat yang mengasosiasikan penerimaan dan pengiriman melalui telepon
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> / Tanggung Jawab sosial Perusahaan
JKJT	: Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>Tagline</i>	: Sebuah tagar yang mengasosiasikan sebuah gerakan tertentu
<i>Treatment</i>	: Sebuah perlakuan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.¹ Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan. Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa adanya warga negara yang belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dikarenakan belum memperoleh pelayanan sosial secara maksimal oleh negara. Masih adanya warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat salah satu PMKS nya adalah Anak Jalanan.

Pada umumnya anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri: Anak yang berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya terlihat kusam serta berpakaian

¹ Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial diakses <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p> pada 17 januari 2018, pukul 12.11 WIB

yang kusam pula dan mereka memiliki mobilitas perpindahan yang sangat tinggi². *The United Nations Children's Emergency Fund* atau UNICEF mengklasifikasikan anak jalanan menjadi dua yaitu *Children On the Street* & *Children Of the Street*. Anak jalanan yang dklasifikasikan kedalam golongan *On the Street* adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Sedangkan sebaliknya yang di golongkan kedalam *Of the Street* adalah kelompok anak-anak yang sudah tidak memiliki hubungan dengan sanak saudaranya.

Studi tersebut diobservasi oleh UNICEF sebagai suatu fenomena bahwa anak jalanan yang sudah tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya memiliki motivasi hidup dijalanannya bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi semata, namun melainkan juga terjadi kekerasan dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi mereka kehidupan dijalanannya tak kalah keras, namun mereka memilih kehidupan yang jauh dari arti kekerasan yang bersumber dari orang tua mereka yang tak dapat mereka hindari. Jika berada di jalanan anak jalanan tersebut dapat lari dari ancaman tindakan kekerasan tersebut yang berujung dengan pukulan serta siksaan fisik lainnya. Tindakan ini menjadi tindakan alternatif yang dilakukan oleh anak-anak tersebut³. Permasalahan anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi semata namun juga adanya disfungsi keluarga, lingkungan, dan kehidupan jalanan yang memberi

² Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

³ *The United Nations Children's Emergency Fund Indonesia*, https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf terakhir diakses pada 18 Januari 2018 Pukul 14.34 WIB

kebebasan hidup untuk berkembangnya populasi dari anak-anak jalanan ini bisa tumbuh terutama di kota-kota besar. Sesuatu hal semacam ini merupakan maslaaha yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. kehidupan jalanan merupakan kehidupan yang penuh kekerasan dan eksploitasi keadaan tersebut akan menyebabkan anak mengalami depresi dan kehilangan arah tujuan hidup yang berimbuah pada terbentuknya moral-moral premanisme dalam diri seorang anak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2016 anak jalanan terdapat 2405 anak yang tersebar di 79 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Timur⁴. Pemerintah Kota Malang sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Peraturan ini menjadi pedoman dan acuan Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan dan program mengenai perlindungan dan rehabilitasi untuk anak jalanan. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua bidang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dinas Sosial Kota Malang Bapak Nunang, Ia menyebutkan bahwa segala tindakan serta penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang berasakan pada peraturan tersebut⁵. Peraturan daerah tersebut mengatur segala penanganan anak, baik itu hak anak, kekerasan pada anak, perlindungan pada anak termasuk dalam konteks

⁴ Data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 diakses <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> pada 1 Februari 2018, Pukul 15.17 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Nunang selaku Wakil Ketua bidang LKS Dinas Sosial Kota Malang pada 8 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB

permasalahan anak yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti anak jalanan. Adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah Kota Malang akan memiliki standar dan pedoman dalam melaksanakan penanganan terhadap anak jalanan.

Keadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganannya yaitu, Pertama, kurang tingkat kemandirian dari warga PMKS, kedua terbatasnya aparatur teknis pada bidang sosial, dan ketiga lemahnya peran SKPD lainnya dalam penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kota Malang juga menargetkan beberapa aspek dalam Rencana Strategis 2014-2018 yaitu terwujudnya upaya pemulihan, pengembangan kemampuan dan penggalan potensi diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meningkatkan kemampuan dan kualitas melalui program pemberdayaan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, dan menciptakan PMKS yang dapat memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya⁶. Dalam rencana strategis pula disebutkan tujuan yang ingin diraih dalam pelaksanaan rencana oleh Dinas sosial yaitu adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, Meningkatnya kualitas dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial dan meningkatnya peran serta pola kemitraan dan nilai-nilai kesetiakawanan lembaga dan atau perorangan dalam penyelenggaraan sosial⁷. Tujuan tersebut

⁶ Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang pada tahun 2014-2018

⁷ *ibid*,

membuktikan bahwa dalam perumusan Rencana strategis, Dinas sosial menginginkan untuk meningkatnya segala pelayanan di bidang sosial serta pelayanan yang berbasis pola kemitraan yang dalam implementasinya Dinas Sosial meraih tujuan tersebut dengan program-program yang dijalankan berdasarkan tujuan tersebut.

Peneliti melakukan penelitian di daerah kota Malang karena di Kota Malang jumlah anak jalanan masuk dalam peringkat pertama dari seluruh distrik kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
Jumlah Anak Jalanan Kota Malang dari 2011-2016

Tahun	Jumlah Anjal
2011	487
2012	524
2013	213
2014	186
2015	160
2016	104

Sumber :Dinas Sosial Kota Malang

Jumlah Anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 104 orang yang terbagi atas 56 orang anak laki-laki dan 48 anak perempuan yang tersebar diseluruh wilayah kota malang yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru dan Sukun. PMKS Anak Jalanan di Kota Malang termasuk yang paling tinggi di Jawa Timur meski jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun dan tentunya itu menandakan bahwa masih belum nya teratasi masalah tersebut secara penuh dan kontinyu.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak jalanan yang jumlahnya cukup banyak sangat perlu dilakukan, karena anak jalanan di Kota Malang sebagai anak juga memiliki hak-haknya yang harus terpenuhi. Anak Jalanan seringkali tidak terpantau keberadaannya. Penanganan anak jalanan yang belum maksimal tersebut itulah yang menyebabkan jumlah anak jalanan di Kota Malang cukup tinggi dibandingkan di wilayah kota lain di Provinsi Jawa Timur. Penanganan anak jalanan tidak harus selalu menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial, seharusnya peran dari *Non Government Organization (NGO)* yang bergerak di bidang sosial anak harus turut andil dalam proses penanganan dari anak jalanan. Keseimbangan itulah yang harus tercipta dari sebuah pola pemerintahan yang baik. Dibuktikan oleh kerjasama yang dijalin oleh Dinas Sosial dengan beberapa NGO dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang selain itu juga peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial perlu dilakukan agar dapat menciptakan keseimbangan dalam sebuah struktur pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menciptakan keluaran yang baik pula dalam suatu bentuk penanganan.

Penanganan PMKS pada anak jalanan harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang dan seluruh elemen masyarakat. Untuk menangani anak jalanan tidak hanya diperlukan rehabilitasi, melainkan juga aksesibilitas bagi seluruh elemen untuk bergotong-royong menyelamatkan anak jalanan. Pemerintah Kota Malang dan seluruh aktor elemen masyarakat harus berupaya untuk memberikan kepedulian terhadap anak jalanan, terutama untuk mengedepankan penyelamatan generasi masa depan bangsa yang berada pada anak-anak tersebut.

Adapun alasan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada anak jalanan di Kota Malang yaitu *pertama*, bahwa jumlah anak jalanan di Kota Malang adalah yang tertinggi dibandingkan daerah kota lainnya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 terbukti dengan data PMKS Dinas Sosial yang tercantum pada data badan pusat statistik pada tahun 2016 yang mencapai 104 Orang⁸.

Kedua, peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, adanya perda tersebut maka Pemerintah Kota Malang sudah sadar akan keberadaan dan eksistensi PMKS tersebut dan dalam penanganannya sudah dirumuskan dalam Pasal 4 dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif serta rehabilitatif serta mengedepankan asas Pengayoman, Kemanusiaan,

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diakses <https://jatim.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3> 17 januari 2018, pukul 11.11 WIB

Keluargaan, Keadilan dan Ketertiban sesuai yang disebutkan dalam Pasal 2 Perda Nomor 9 Tahun 2013.

Ketiga, Deklarasi Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa pada tahun 2016 bahwa Indonesia Menuju Bebas Anak Jalanan pada Tahun 2017 yang di deklarasikan oleh beliau di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2016. Beliau menyebutkan bahwa akan ada koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah dan akan di koordinasikan secara kontinyu yang dalam pelaksanaannya terimpelementasi melalui program Pemberdayaan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Desaku Menanti yang dijalankan pada tahun 2016⁹.

Keempat, adanya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah yaitu Dinas Sosial dengan beberapa Mitra lembaga sosial terutama dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) terkait penanganan anak jalanan di Kota Malang. Hubungan ini yang saling melengkapi keterbatasan antar aktor dalam penanganan anak jalanan. JKJT sendiri sudah menjadi Mitra tetap dari Dinas Sosial dalam menjalankan penanganan Anak Jalanan. serta terdapat aktor swasta yaitu Bank Indonesia yang merupakan perusahaan bidang perbankan yang turut andil membantu dalam bentuk pendanaan dalam program-program Dinas Sosial.

⁹ Mensos Kembali Deklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/27/09421611/mensos.kembali.deklarasikan.indonesia.bebas.anak.jalanan.2017> diakses pada tgl 20 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB & Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018

Alasan-alasan di atas membuat peneliti tertarik untuk menjadikan penanganan PMKS pada anak jalanan sebagai penelitian ini. Pada penelitian ini berfokus pada aktor pemerintah dan aktor sosial dan aktor swasta dalam penanganan pada anak jalanan di Kota Malang, karena dalam hal ini merupakan bukan tugas pemerintah saja melainkan juga merupakan tanggung jawab dari aktor sosial serta pihak swasta. Selain itu, peneliti juga dapat mendeskripsikan hambatan-hambatan apa saja yang membuat kurang tertanganinya anak jalanan di Kota Malang. Peneliti melihat bahwa penanganan PMKS pada anak jalanan bukan hanya tugas pemerintah saja namun menjadi tanggung jawab dan koordinasi dengan aktor sosial lainnya baik itu masyarakat, lembaga sosial, pemerintah serta pihak swasta. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pasti untuk menangani masalah-masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang dijawab dengan penelitian ini yaitu, bagaimana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2016 serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mendeskripsikan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Anak Jalanan di Kota Malang tahun 2016 dan alur peran berbagai

aktor baik Pemerintah, Lembaga Sosial dan Swasta yang terlibat dalam penanganan Anak Jalanan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya pada anak jalanan dalam disiplin ilmu program studi Ilmu Pemerintahan, serta tidak menutup kemungkinan dalam lintas disiplin ilmu berbeda.
2. Penelitian ini sebagai pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti untuk pendalaman dan pemahaman mengenai penanganan PMKS pada Anak Jalanan, yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan terkait pola penanganan PMKS khususnya pada Anak Jalanan di Kota Malang yang lebih baik lagi di tahun berikutnya.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman baru bagi masyarakat mengenai penanganan PMKS pada Anak Jalanan

bahwa penanganan PMKS Anak Jalanan bukanlah hanya tugas dari pemerintah saja melainkan seluruh elemen masyarakat.

3. Bagi Pemerintah daerah yang lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan dalam penanganan PMKS di daerah masing-masing.



BAB II

KERANGKA TEORITIK

2.1 Penelitian Terdahulu

Bab ini menjelaskan mengenai temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu ini menurut peneliti merupakan salah satu masalah data pendukung tentang masalah yang sedang dibahas. Fokus penelitian terdahulu adalah yang dijadikan data pendukung yaitu terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian skripsi maupun jurnal.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penulis mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Implementasi kebijakan program layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu (Indra Gunawan) (2014)	a) Kondisi perencanaan dan memanaajemenkan hingga pada pelaksanaan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar di Kota Bengkulu oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu. Di dalam implementasi tersebut antara lain terdiri dari Organisasi Pelaksanaan, interpretasi program	a) Penelitian tersebut menganalisis anak terlantar di Kota Bengkulu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada anak jalanan saja di kota Malang. b) Lokasi di Bengkulu

		dan yang terakhir adalah penerapan program tersebut. Namun pada penerapannya tersebut tidak berjalan dengan baik karena program layanan tersebut tidak diterima dengan baik oleh anak jalanan sebagaimana tujuan utama program PMKS bagi anak jalanan dan terlantar di Kota Bengkulu.	
2	Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kasus anak jalanan di Kota Surakarta) (Fedri Apri) (2014)	Merupakan program kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah terhadap anak jalanan antara lain penjaringan, identifikasi, <i>home visit</i> dan pelatihan bagi anak jalanan	Penelitian tersebut menganalisis realitas kehidupan anak jalanan dan dilakukan di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan PMKS anak jalanan di Kota Malang.
3	Penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang (Puji Endah Wahyu) (2013)	Hasil dari tulisan ini adalah penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal pengetahuan yang diberikan dinas sosial pemuda dan olahraga Kota Semarang adalah pengetahuan mengenai pendidikan kursus keterampilan.	Penelitian tersebut menganalisis tentang penanganan anak jalanan di rumah perlindungan sosial sedangkan penelitian ini berfokus pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu di Kota Malang
4	Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Septian Haris Maulidhi) (2016)	Tulisan ini mengulas tentang implementasi kebijakan yang terdapat pada dinas sosial kota malang yang menangani anak jalanan. Konsep yang digunakan adalah berpatokan pada	Perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan konsep dan teori. Pada penelitian ini menggunakan <i>teori governance</i> yang lebih menelitik kepada good governance dalam

		peraturan menteri sosial no 111 tahun 2009 tentang indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial	sebuah penanganan kasus anak jalanan.
--	--	---	---------------------------------------

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)

Penelitian terdahulu yang pertama ini berasal dari penelitian kualitatif yang diteliti oleh Indra Gunawan yang berjudul “Implementasi kebijakan program layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu”. Hasil analisis dari jurnal penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa, Kondisi perencanaan dan manajemen hingga pada pelaksanaan program PMKS anak jalanan dan anak terlantar di Kota Bengkulu oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu. Di dalam implementasi tersebut antara lain terdiri dari Organisasi Pelaksanaan, interpretasi program dan yang terakhir adalah penerapan program tersebut. Namun pada penerapannya tersebut tidak berjalan dengan baik karena program layanan tersebut tidak diterima dengan baik oleh anak jalanan sebagaimana tujuan utama program PMKS bagi anak jalanan dan terlantar di Kota Bengkulu¹.

Penelitian kedua bersumber dari penelitian kualitatif yang diteliti oleh Fedri Apri yang berjudul “Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kasus anak jalanan di Kota Surakarta)” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa realitas kehidupan anak jalanan di Kota Surakarta yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kota layak anak. Sistem yang dibuat oleh Dinas

¹ Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, *Jurnal Ilmiah S-1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu*

Sosial setempat sudah sangat baik dari tahap ketahapnya hingga sang anak jalanan tersebut di bina dan dibekali oleh pengetahuan yang bermanfaat².

Penelitian berikutnya yaitu ketiga adalah penelitian kualitatif yang diteliti oleh Puji Endah Wahyu untuk mengentaskan pendidikannya untuk memperoleh gelar sarjana di bidang program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hasil dari tulisan dia adalah penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal pengetahuan yang diberikan dinas sosial pemuda dan olahraga Kota Semarang dalam pengetahuan mengenai pendidikan kursus keterampilan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bermanfaat untuk anak jalanan yang direhabilitasi. Penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal keterampilan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berupa keterampilan menjahit, perbengkelan dan tambal ban setahun sekali. Sedangkan penanganan keterampilan yang oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi berupa pelatihan perbengkelan dan tambal ban bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang³.

Penelitian yang terakhir merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang bernama Septian Haris Maulidhi dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial kota malang pada tahun

² Fedri Apri, 2014, *Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kasus anak jalanan di Kota Surakarta)*, Jurnal Ilmiah S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

³ Puji Endah Wahyu, 2013, *Penanganan anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, Jurnal Ilmiah S-1 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang

2015. Ruang lingkup yang digunakan cukup mirip dengan penelitian ini namun fokus dan keluaran yang diinginkan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut. Septian menulis penelitian tersebut menggunakan prespektif peraturan menteri sosial No 111 tahun 2009 dan menganalisis impleentasinya dalam realitas yang terjadi dilapangan. Penelitian tersebut juga memfokuskan pada pembangunan kesejahteraan sosial⁴.

Dari penjabaran penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaannya pada penelitian ini melibatkan aktor sosial dan aktor pemerintah, selain itu juga pada penelitian ini menggunakan teori *governance* yang dimana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan teori yang sama. Adapun persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan pada anak jalanan, dan juga adanya persamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif.

2.2 Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang RI No 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup rakyat dan mampu mengembangkan diri. Sejalan dengan hal itu, perlu adanya pembangunan kesejahteraan sosial yang difokuskan dengan memberi perhatian yang lebih kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung

Menurut Glosarium penyelenggara kesejahteraan sosial tahun 2009, Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS adalah seseorang,

⁴ Septian Haris Maulidhi, 2016, *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang, Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*

keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan dan gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar⁵.

Hambatan yang di maksud dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan ketunaan sosial. Pada saat ini terdapat 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Sebagai berikut:⁶

- a) Anak Balita Terlantar : Merupakan anak yang berusia 5 tahun kebawah yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan
- b) Anak Terlantar : Anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah, yang telah di telantarkan oleh orang tua.
- c) Anak yang berhadapan dengan hukum : Seseorang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang memiliki kasus hukum
- d) Anak Jalanan : Anak yang rentan bekerja dijalanan dan atau anak yang hidup dijalanan yang sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari
- e) Anak dengan kedisabilitasan : seseorang yang belum berusia 18 tahun yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu fungsi-fungsi sosial
- f) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : anak yang terancam secara fisik maupun nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya
- g) Anak yang memerlukan perlindungan khusus : anak yang berusia 6-18 tahun yang dalam keadaan situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi, secara ekonomi atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, napza, penculikan, penjualan.
- h) Lanjut usia terlantar : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat menjalankan kebutuhan dasarnya
- i) Penyandang disabilitas : mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana berhadapan dengan berbagai hambatan

⁵ Kementerian Sosial RI, 2012, *Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia 2011*, Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Hlm 41

⁶ Kementerian Sosial RI, 2013, *Buku Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*, RI, Hlm 7

- j) Gelandangan : orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal tetap.
- k) Pengemis : orang-orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta sehingga mendapatkan penghasilan dengan mengharapkan belas kasihan
- l) Pemulung : orang yang memiliki pekerjaan dengan memungut dan mengumpulkan barang bekas diberbagai tempat dengan maksud barang-barang tersebut didaur ulang dan dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis
- m) Kelompok Minoritas : kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi oleh kelompok mayoritas maupun masyarakat seperti Gay, Lesbian dan Waria.
- n) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) : seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai putusan pengadilan yang mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam bermasyarakat.
- o) Tuna Susila : seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama maupun lawan jenis diluar perkawinan yang sah yang memiliki tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa
- p) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) : seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS yang membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, pengobatan dan dukungan untuk mencapai kualitas hidup yang normal
- q) Korban penyalahgunaan NAPZA : seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif diluar pengobatan atau sepengetahuan dokter berwenang.
- r) Korban *Trafficking* : seseorang yang telah mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi, sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan manusia.
- s) Korban tindak kekerasan : seseorang yang mengalami kekerasan baik individu, keluarga maupun kelompok, baik berupa diskriminasi, eksploitasi dan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang menempatkan pada situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- t) Pekerja Migran Bermasalah Sosial : pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial dan mengalami gangguan pada fungsi sosialnya.
- u) Korban Bencana Alam : seseorang yang menderita dan meninggal akibat dari bencana alam
- v) Korban Bencana Sosial : orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana sosial yang diakibatkan peristiwa sosial meliputi konflik sosial, teror
- w) Perempuan Rawan Sosial : seseorang perempuan dewasa menikah atau telah janda yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

- x) Fakir Miskin : orang-orang yang tidak memiliki sumber penghasilan dan mata pencaharian tetap serta tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya
- y) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis : keluarga yang dimana diantara anggota keluarganya dalam berhubungan kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarganya dalam berhubungan kurang serasi sehingga tidak dapat berjalan lancar
- z) Komunitas Adat Terpencil : Kelompok sosial budaya lokal yang belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Banyaknya jenis PMKS memerlukan adanya pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah maupun Kemensos RI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat karena penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki berbagai keterbatasan dan mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan kemasyarakatan sosial di daerah

2.3 Anak Jalanan

The United Nations Children's Emergency Fund atau *UNICEF* mendefinisikan pengertian dari anak jalanan adalah :

“street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life” (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya)

serta mengklasifikasikan anak jalanan menjadi dua yaitu :

- a) *Children On the Street*
- b) *Children Of the Street.*

Anak jalanan yang diklasifikasikan kedalam golongan *On the Street* adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Sedangkan

sebaliknya yang di golongan kedalam *Of the Street* adalah kelompok anak-anak yang sudah tidak memiliki hubungan dengan sanak saudaranya. Studi tersebut diobservasi oleh UNICEF sebagai suatu fenomena bahwa anak jalanan yang sudah tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya memiliki motivasi hidup dijalanannya bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi semata, namun melainkan juga terjadi kekerasan dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya⁷.

Anak jalanan menurut Glosarium Kementerian Sosial RI, Anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya⁸. Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, anak jalanan merupakan mereka anak-anak dibawa umur yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dijalanannya yang tidak mendapatkan kehidupan anak yang layak serta harus memperjuangkan kehidupannya untuk bekerja dijalanannya. Anak jalanan merupakan salah satu dari PMKS yang memiliki karakteristik berbeda dengan yang lainnya karena anak jalanan di kategorikan sebagai permasalahan yang cukup vital karena penanganan terhadap anak harus dikedepankan untuk penyelamatan generasi muda.

⁷ *The United Nations Children's Emergency Fund Indonesia*,
https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf terakhir diakses pada 18 Januari 2018 Pukul 14.34 WIB

⁸ Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial diakses
<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p> pada 17 Januari 2018, pukul 12.11 WIB

Faktor penyebab munculnya anak jalanan adalah masalah kemiskinan dan ekonomi. Kondisi ini dipicu oleh krisis moneter serta dilanjutkan dengan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soetarso (1996) seorang pakar pekerjaan sosial menjelaskan bahwa dampak krisis moneter dan ekonomi serta kesenjangan sosial di masyarakat dalam kaitannya dengan anak jalanan adalah :

- a) Orang tua mendorong anak untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga
- b) Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan
- c) Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah
- d) Semakin banyaknya anak jalanan karena biaya hidup untuk menyewa rumah terlalu tinggi

Perkembangan situasi dan permasalahan anak jalanan yang kompleks merupakan tantangan untuk membentuk kerangka kerja yang bertumpu pada pemenuhan hak-hak anak jalanan. Hal ini, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak jalanan serta pemenuhan kebutuhannya akan pendidikan, perlindungan dan kesehatan. Anak jalanan adalah sebuah contoh satu dari sekian banyak PMKS yang harus segera dituntaskan dalam bentuk kinerja kerja yang tak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun dari daerah saja namun merupakan tanggung jawab dari elemen lain yaitu sektor informal lainnya seperti masyarakat dan kalangan swasta maupun *NGO*.

2.4 Teori Governance

Pendekatan *governance* ini bisa digunakan di ranah studi pemerintahan atau interaksi antara negara dan masyarakat, serta juga bisa menjadi alat untuk memahami persoalan situasi negara yang gagal.⁹ *Governance* yang efektif, yaitu adanya keterlibatan aktor formal dan informal dalam sebuah aksi publik untuk pencapaian suatu tujuan yang merupakan kebutuhan bersama.

Teori *governance* dapat memberikan kontribusi dengan mengubah gaya pemikiran yaitu dari “atau” menjadi “dan”, yang dimana dalam hal ini diperlukan sebuah integrasi antara beberapa sektor, baik formal maupun informal. Teori *governance* menciptakan sarana untuk menyatukan berbagai perilaku individu dengan struktur dan institusi yang ada.¹⁰ Pada saat mengatasi persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu aktor saja, dan untuk menyelesaikannya butuh pembuatan keputusan secara kolektif dan implementasi sebuah kebijakan. Teori *governance* yang diungkapkan oleh Guy Peters dalam jurnalnya, maka *governance* memiliki empat tahap dalam pencapaian sebuah tujuan dari *governance*, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Pemilihan tujuan. *Governing* merupakan sebuah kemudi (*steering*), dalam *steering* membutuhkan pengetahuan mengenai tujuan yang akan dicapai dan merupakan sebuah arah yang harus dituju dalam proses *steering* dalam pemilihan tujuan ini tidak hanya dijalankan oleh aktor negara saja tetapi juga melibatkan aktor-aktor sosial. Karena *governance* yang efektif membutuhkan integrasi dalam pemilihan tujuan dari berbagai sistem.

⁹ Guy Peters, 2011, *Governance as Political Theory*, Departement of Political Science Vol .5 No.1 Hlm 66

¹⁰ *Ibid*, Hlm 65

¹¹ *Ibid*

2. Rekonsiliasi dan Koordinasi. *Governance* yang efektif memiliki koordinasi aksi antar aktor berdasarkan prioritas utama tersebut.
3. Implementasi. Keputusan yang telah diambil dari tahap pemilihan tujuan, rekonsiliasi dan koordinasi diatas, maka selanjutnya dilaksanakan pengimplementasian. Dalam implementasi tersebut dijalankan oleh aktor negara dan bisa juga melibatkan aktor sosial
4. Umpan balik dan Akuntabilitas. Setelah adanya implementasi maka para aktor dapat mengambil kesimpulan atas aksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa, aktor-aktor dapat melakukan perbaikan apabila implementasi tidak sesuai dengan tujuan. Serta juga sebagai bentuk pertanggungjawaban aktor-aktor tersebut.

Di atas di jelaskan elemen-elemen dari dasar *governance*, dengan mengulas pembuatan keputusan, mobilisasi sumberdaya, implementasi. *Governance* dengan menghubungkan dan memberikan cara untuk memahami antar pemerintah dengan aktor lainnya. Peters menjelaskan bahwa, prinsip *governance* yang normatif memiliki asumsi dasar bahwa *governance* penting bagi kualitas hidup rakyat, dan juga penting bagi kesuksesan negara dalam peran nasional dan internasional.¹² *Governing* yang efektif dimana pemerintah memberikan pelayanan publik untuk rakyatnya. *Governance* menjadi kuat ketika istilah “*Good Governance*” digunakan, hal ini jika pemerintah mampu melaksanakan tugas dengan efisien, serta dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. *Good governance* merupakan sebuah eksistensi sebuah negara yang dapat beroperasi sendiri atau bekerjasama dengan partner dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik.

Governance menumbuhkan pertukaran sumberdaya antar aktor yang terlibat serta dapat menguatkan kepercayaan dan modal sosial dalam governing.

¹² *Ibid*, Hlm 68

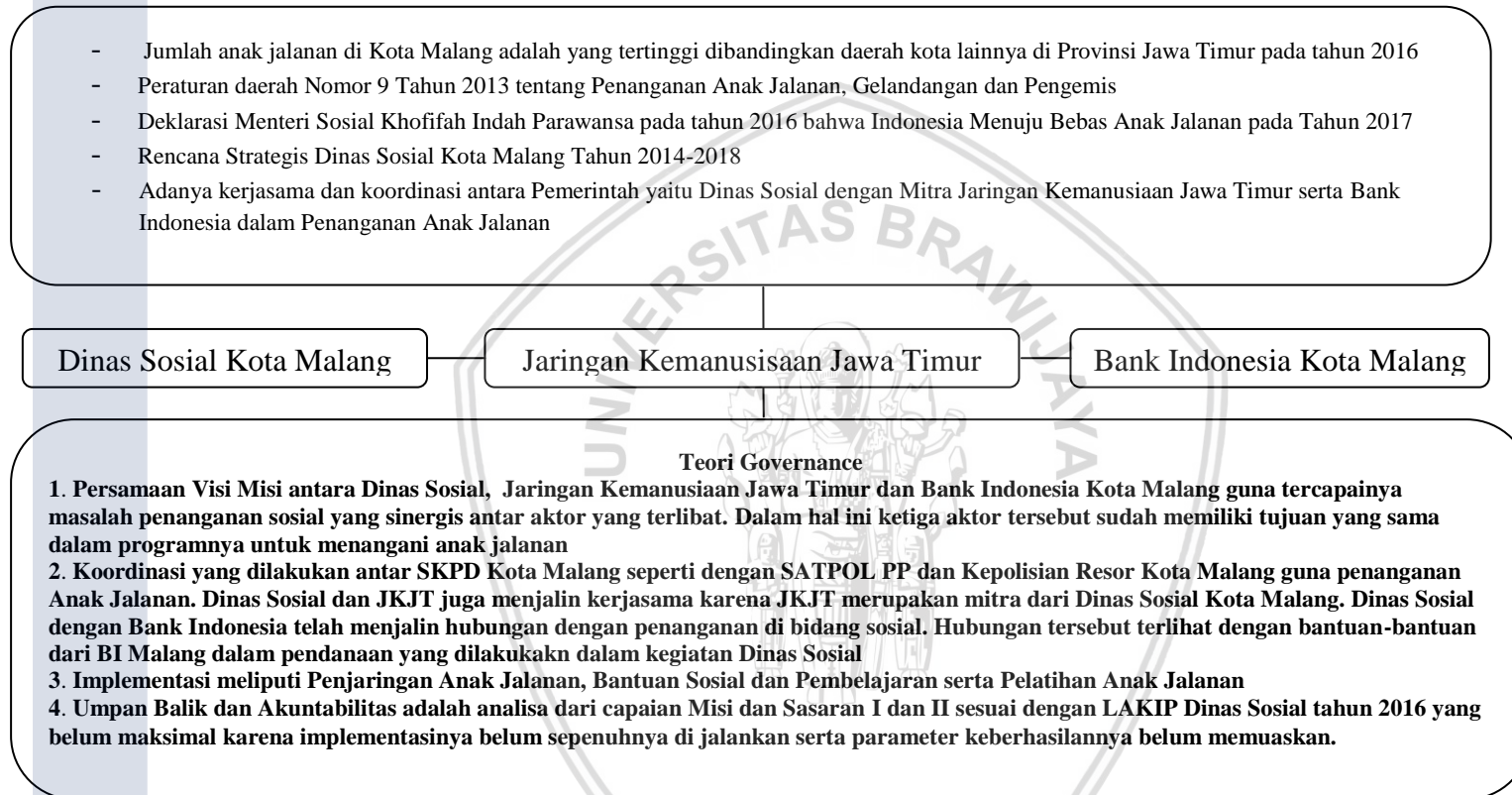
Adanya aturan yaitu, konstitusi, dan juga aturan dan prosedur dalam institusi yang dimana aturan tersebut memudahkan pengambilan keputusan disaat adanya permasalahan. Mekanisme tersebut berperan sentral dalam *governance* yang dimana di dalam mekanisme tersebut melibatkan banyak aktor. Teori *governance*, oleh karena itu membutuhkan penciptaan sarana untuk menyatukan berbagai aktor dengan struktur dan institusi yang ada.

Penggunaan teori ini dalam penelitian ini yaitu dengan melihat bahwa dengan penanganan PMKS khususnya anak jalanan bukan hanya tugas pemerintah saja. Penanganan PMKS pada anak jalanan di Kota Malang ini pemerintah tidak berjalan sendiri, beberapa aktor lainnya organisasi bidang sosial lainnya yang bergerak dalam penanganan anak jalanan ini bersama sama memberikan penanganan bagi anak jalanan di Kota Malang. Serta dilibatkannya aktor swasta dalam mendukung penanggulangan serta pemberian edukasi terhadap anak jalanan tersebut. pada hal ini adanya keterlibatan aktor yang saling berkoordinasi dengan aktor lainnya. Aktor pemerintah dan aktor sosial baik itu masyarakat, lembaga sosial, swasta dapat secara bersama sama dengan koordinasi yang jelas untuk melakukan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Teori ini memberikan tahap dasar penanganan yang dapat dijadikan acuan peneliti dalam menganalisis penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Malang.



2.5 Alur Pemikiran Penelitian

Bagan 2.1 Alur Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab III penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang nantinya akan digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Pada bagian ini metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, fokus dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, biasanya terdapat empat kata kunci yang digunakan yakni cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹

Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri.² sedangkan penelitian deskriptif ditujukan guna menjabarkan data dan variabel yang diperoleh mengenai fenomena

¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2011. hlm 2

²Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. 2016. hlm 15

atau kenyataan sosial yang diteliti.³ penelitian deskriptif dilakukan dengan memandang objek sesuai yang ada dilapangan. jadi dalam penelitian membahas tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dengan memahami proses dari *governance*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang, yang beralamat di Jl. Raya Sulfat No 12 Kota Malang, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Malang adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menaungi dan mengurus semua masalah sosial yang ada di Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis sudah mewawancarai Wakil bidang LKS Dinas Sosial Kota Malang, Staff dari Dinas Sosial, Satpol PP sebagai satuan pamong praja yang bertugas membantu Dinas Sosial dalam menertibkan anak jalanan, Unit PPA Polresta Malang, Psikolog Anak dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur sebagai bagian dari NGO penanganan masalah anak jalanan di Kota Malang,

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian perlu dilakukan agar penelitian dapat terstruktur dan penulis pembatasi ruang lingkup penelitian agar tidak melenceng dari fokus utama. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif pada proses penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. *Treatment* apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta kendala-kendala yang dihadapi mengenai permasalahan tersebut. Fokus lainnya juga mengamati aktor-aktor yang terlibat dari penanganan Anak Jalanan itu. Mulai dari Dinas Sosial, Jaringan

³ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. jakarta. 2005. hlm 20

Kemanusiaan Jawa Timur dan Bank Indonesia Kota Malang. Pihak lain pun juga menjadi pertimbangan bahwa penanganan anak jalanan membutuhkan pengetahuan dari akademisi yang turut pula terjun di bidang penanganan dan bidang pertumbuhan sosial anak.

3.4 Jenis Data

Pada saat penelitian lalu, diperlukan beberapa komponen dalam mengulas hasil penelitian tersebut. Data disini merupakan salah satu komponen penting dalam mengkaji suatu penelitian. Adapun jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau langsung dari informan yang memiliki informasi atau data tersebut, serta melalui proses wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan di Kota Malang. Data primer yang peneliti dapatkan berupa wawancara dengan narasumber-narasumber yang sudah di tentukan sebelumnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016, Rencana strategis Dinas Sosial tahun 2014-2018 serta dokumentasi foto yang dilakukan selama proses penelitian.

⁴Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Erlangga. Jakarta. 2009. hlm 86

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan asli informan, tetapi memiliki informasi atau data tersebut. data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung baik melalui studi literatur maupun studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. data ini dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan penelitian. Data sekunder yang didapatkan adalah hasil penelitian terdahulu, *website-website* pendukung dan juga dokumen-dokumen lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data dibutuhkan kecermatan dan ketelitian agar mendapatkan hasil sesuai dengan penelitian yang telah ditentukan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dan data dari informan atau narasumber yang memiliki informasi terkait fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara merupakan salah satu bentuk proses dari pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber.

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur seringkali disebut suatu

wawancara terfokus, mendalam, dan pewawancara dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya oleh karena itu dapat dibuat kerangka pertanyaan yang tepat. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah seorang pewawancara tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya, dan harus perpedoman kepada informan untuk menceritakannya.⁵

Dari penjelasan diatas peneliti telah menggunakan model wawancara terstruktur, dimana peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam pelaksanaan wawancara tentunya peneliti sudah menyiapkan alat bantu seperti buku daftar pertanyaan, *tape recorder*. Untuk menemukan narasumber yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik ini dilakukan dengan cara menentukan target narasumber terlebih dahulu namun terdapat narasumber yang didapatkan dari hasil pembicaraan dengan narasumber lainnya yang juga turut terlibat dalam penanganan dan aktor yang menanganani Anak Jalanan di Kota Malang. Berikut beberapa daftar narasumber yang menjadi informan bagi peneliti:

⁵Rulam Ahmadi. *Op.Cit.* hlm 122

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Putri Lolyta Dian Sari	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang
2	Nunang	Wakil bidang LKS Dinas Sosial Kota Malang
3	Mama Ria	Staf Penasehat JKJT Kota Malang
4	Ari Pratiwi	Psikolog Anak
5	Okta Febri	Staf Unit PPA Polresta Malang
6	Dian Ayu	Staf Humas Bank Indonesia Kota Malang
7	Ika Wahyu	Mantan Anak Jalanan Binaan JKJT
8	Syska Kristina	Kepala Bagian Pengelola Data Satpol PP Kota Malang
9	Dayat	Anak Jalanan Binaan Rumah Belajar JKJT

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2018)

Berdasarkan data narasumber diatas, penulis telah memiliki beberapa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. Teknik penentuan narasumber tersebut pula yang dipilih tentunya berdasarkan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap dari sumber yang dipercaya.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang selanjutnya penulis gunakan untuk memperkuat data saat penulisan. Adapun tujuan dari metode dokumentasi yakni untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi dijadikan data yakni berupa foto-foto selama melakukan penelitian maupun dokumentasi lainnya yang terkait dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak

⁶*Ibid.* hlm 120

jalanan. Selain dokumentasi yang penulis dapatkan melalui metode dokumentasi yakni produk hukum maupun laporan-laporan hasil dari penyelenggaraan rehabilitasi pengawasan serta pendataan. Foto yang peneliti dapatkan tersebut guna menunjang *statement* peneliti dalam implementasi dari penanganan anak jalanan tersebut. bentuk dokumentasi yang telah penulis dapatkan berupa dokumentasi wawancara terhadap narasumber dari Dinas Sosial Kota Malang, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, Psikolog Anak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Kepolisian Resor Kota Malang.

3.5.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penulisan penelitian ini menjadi faktor pendukung dalam pengerjaannya. Studi pustaka sendiri merupakan kumpulan dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, arsip maupun dokumen-dokumen lainnya yang dapat dijadikan referensi bagi penulisan penelitian dan memiliki peran penting untuk menambah pengetahuan penulis tentang teori dan fokus penelitian. Adapun beberapa buku yang peneliti baca dan kutip mulai dari buku panduan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian sosial hingga jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan inspirasi dalam penulisan.

3.6 Teknis Analisis Data

Proses penelitian kualitatif akan melibatkan data variabel yang banyak, yang harus ditranskripsikan, objek-objek, situasi ataupun peristiwa dengan aktor yang sama atau bahkan sama sekali berbeda. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti masih berupa data mentah, yang harus diolah dan dianalisis. Seperti

contohnya data LAKIP 2016 dan Renstra Dinas Sosial Kota Malang 2014-2018 yang harus peneliti bedah dalam implementasi dan capaiannya sehingga menjadi masukan bagi instansi terkait. Sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.

Peneliti dalam analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jenis analisis data ini saling menjalin satu sama lain pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membentuk wawasan umum yang disebut analisis. Analisis yang dilakukan peneliti ini berdasarkan dari wawancara, dokumentasi dan pernyataan narasumber yang ditulis dan dirangkum serta dikaitkan dengan pencapaian dalam LAKIP 2016. Sinkronisasi data sangat peneliti perhatikan dalam proses analisa data tersebut, apakah data tersebut sama atau tidak. Data lainnya yang menjadi acuan peneliti adalah hasil capaian misi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2016) Dinas Sosial Kota Malang yang menyorot banyak sekali program kerja dan hasil capaiannya. Proses penyerapan anggaran yang belum maksimal dan lain-lain sehingga tercipta analisa yang matang dan mendukung dan membangun sebuah kesimpulan dalam kasus penanganan anak jalanan di Kota Malang tahun 2016.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Kota Malang

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Kota Malang merupakan salah satu daerah dari 9 kota yang berada di provinsi seluruh wilayah Jawa Timur. Pada tanggal 1 Januari 2001 wilayah yang semula satu kesatuan kabupaten Malang akhirnya memisahkan diri dan menjadi bagian wilayah perkotaan yang kita sebut Kota Malang. Namun ketetapan hari jadi Kota Malang ditetapkan pada tanggal 1 April 1914 berkenaan dengan ditetapkannya wilayah Malang sebagai Kotapraja oleh Pemerintahan Belanda pada saat itu.

Pesatnya pertumbuhan Kota Malang berlanjut hingga saat ini, Kota Malang menjelma menjadi kota urban yang kini memiliki beberapa julukan yaitu Kota Pendidikan, Kota Bunga, Kota Wisata. Perkembangan dalam berbagai sektor tersebutlah yang menjadikan Kota Malang sebagai kota yang dinamis dan dipenuhi oleh pendatang baik dalam berbagai tujuan seperti pendidikan, berwisata dan bekerja.

Secara umum Kota Malang berkedudukan di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 145,28 kilometer persegi. Kota Malang terletak

ditengah tengah wilayah kabupaten Malang dan dibatasi oleh beberapa kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten. Penduduk adalah sebagai subjek dan obyek dalam sebuah pembangunan daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Jumlah Penduduk Kota Malang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 856.410 Jiwa yang tersebar seluruh kecamatan di Kota Malang¹. Jumlah tersebut terdiri dari 422.276 jiwa yaitu berjenis kelamin laki-laki dan 434.134 jiwa yaitu berjenis kelamin perempuan.

4.2 Gambaran Dinas Sosial Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagai unsur perencana dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam ruang lingkup keadaan sosial di Kota Malang. Dinas Sosial memiliki tugas-tugas dan fungsi dalam melaksanakan tupoksi dan urusan rumah tangga daerah terutama dibidang sosial. Dinas sosial memiliki tugas-tugas dan sebagai pelaksana dalam kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan oleh Pemerintah Kota Malang, salah satu pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab dan tupoksi oleh dinas sosial adalah mengenai permasalahan sosial dalam segi penanganannya terutama Anak Jalanan.

Pada peraturan yang telah dirumuskan dan mengacu pada keputusan Walikota Malang No 88 tahun 2011, telah dimasukkannya Anak Jalanan sebagai salah satu bagian dalam kategori dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan

¹ Data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur tentang jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2016 <https://jatim.bps.go.id/dynamic/ta/2017/09/05/61/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-timur-2016.html> diakses pada tanggal 21 April 2018 Pukul 13.07 WIB.

Sosial (PMKS). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan penanganan terhadap PMKS perlu adanya upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen baik dari pihak Pemerintah maupun non Pemerintah, peran serta masyarakat juga menjadi hal penting guna sebagai pengawasan atau bahkan pelaku yang ikut serta dalam penanganan PMKS ini.

Dinas sosial itu sendiri mempunyai fungsi dan tugas yang cukup spesifik yaitu dalam mengurus masalah sosial yang ada di Kota Malang. Kewenangannya berupa meningkatkan kesejahteraan sosial baik terutama dalam penanganan seluruh elemen PMKS yang ada didalamnya. Tentu saja ini bertujuan guna mewujudkan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lebih baik dan sejahtera. Dinas sosial menjadi harapan dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup seseorang terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial dan semua permasalahan sosial dapat diatasi. PMKS merupakan masalah sosial yang ada di Kota Malang dan Dinas Sosial memiliki tugas dalam perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial serta bantuan sosial yang ditujukan kepada para PMKS terutama di Kota Malang.

4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Polisi Pamong Praja berawal pada masa era kolonial VOC pada tahun 1860 yaitu pemerintah kolonial pada masa itu membentuk BAILLUW yaitu semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga sarta menjaga ketantraman dan ketertiban pada masa itu. Lalu selanjutnya BAILLUW dikembangkan dengan bentuk satuan lainnya yang disebut BESTUURS POLITIE

atau nama lain dari polisi pamong praja yang bertugas membantu Pemerintah ditingkat kawedanan. Lalu pada pendudukan jepang Satpol PP beaur dengan kemiliteran dalam fungsi dan tupoksinya. Lalu pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tertanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan “Satuan Polisi Pamong Praja”. Pada era desentralisasi saat sekarang, Satuan polisi pamong praja bertugas guna mengamankan ketertiban yang ada di masyarakat dalam implementasinya Satuan polisi pamong praja menjadi aparaturnya keamanan masyarakat serta mencegah adanya konflik yang terjadi, disamping itu tugas-tugas satuan polisi pamong praja lebih banyak dalam eksekusi lapangan yang juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait guna mengamankan Kota Malang.

4.4 Keadaan PMKS Kota Malang pada tahun 2016

Sesuai dengan salah satu misi Kota Malang yaitu “*Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan*” salah satu misi Kota Malang tersebut merupakan komitmen bahwa Kota Malang serius dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Misi Kota Malang tersebut bertujuan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis katahanan sosial dan ketahanan keluarga. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi yang lebih layak terutama untuk memutus rantai kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang sangat banyak. Terdapat 26 jenis PMKS yang harus ditangani agar mendapat kesejahteraan sosial dan supaya pula tidak mengganggu fungsi sosial bermasyarakatnya. Beberapa

PMKS yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Malang yaitu Anak Jalanan, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang Tahun 2016

No	Jenis PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	2	3	5
2	Anak Terlantar	-	-	0
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	5	25
4	Anak Jalanan	56	48	104
5	Anak dengan Kedisabilitas	79	53	132
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	1	-	1
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	5	5
8	Lanjut Usia Terlantar	830	1349	2179
9	Penyandang Disabilitas	755	642	1397
10	Tuna Susila	-	4	4
11	Gelandangan	9	1	10
12	Pengemis	32	39	71
13	Pemulung	95	25	120
14	Kelompok Minoritas	13	26	39
15	Bekas Warga Binaan	41	3	44

	Pemasyarakatan			
16	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	0
18	Korban Trafficking	-	1	1
19	Korban Tindak Kekerasan	-	4	4
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	0
21	Korban Bencana Alam	78	83	161
22	Korban Bencana Sosial	-	-	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3	916	919
24	Fakir Miskin			37025 Keluarga*
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	0
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

4.5 Keadaan Anak Jalanan Kota Malang Tahun 2016

Menurut Psikolog Ari Pratiwi menyebutkan bahwa fenomena Anak Jalanan ini lumrah terjadi terutama di kota besar termasuk Kota Malang, dikarenakan faktor dari adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa kota. Daya tarik kota yang besar membawa Anak-Anak Jalanan ini turut ada di dalam masalah perkotaan. Selain itu kondisi-kondisi tertentu juga yang membawa mereka turun ke jalanan seperti masalah keluarga, himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Dalam studi psikologi fenomena anak jalanan ini disorot melalui tiga domain yaitu *Fisik, Kognitif dan Psiko Sosial*. Dalam studi fisik menyoroti anak-anak jalanan ini terkait tumbuh kembang dari anak jalanan dari dampak mereka hidup di jalanan, kurangnya pengetahuan akan *Sex Education* sehingga dapat

menimbulkan masalah masalah sosial lain seperti Pelecehan seksual dll. Studi ini juga menyoroti mereka dari perkembangan gizi anak itu sendiri yang kurang jika hidup dijalanan sedangkan dalam studi kognitif, mereka akan kurang dalam pendidikannya karena tidak mengenyam pendidikan akademik sehingga dari segi kognitif anak jalanan akan kurang oleh karena itu sekarang banyak lembaga sosial yang memberikan pendidikan kognitif supaya mereka tidak tertinggal dalam mengenyam pendidikan yang layak.

Jika dalam perspektif Psiko sosial mereka disorot bahwa lingkungan terdekatnya yang menyebabkan anak tersebut turun ke jalanan sehingga mereka dijadikan komoditas utama bagi keluarga untuk dapat menghasilkan uang dari jalanan, ada pula anak jalanan yang terjebak oleh kekerasan dengan orang tuanya sehingga ia kabur ke jalanan dan hidup di jalanan. dalam perspektif-perspektif tersebut anak jalanan dianggap sebagai masalah perkotaan yang kompleks karena melibatkan objek anak yang seharusnya dilindungi oleh negara yang disini Dinas Sosial merupakan tanggung jawab utama dalam penanganannya. Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan di kota Malang dikategorikan sebagai prioritas dibuktikan oleh Wawancara kepada narasumber Ibu Putri selaku staf bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Malang:

“....PMKS ini kan banyak mas, tapi beberapa PMKS memang membutuhkan penanganan yang beda maka dari itu beberapa ada yang kami jadikan prioritas bahkan setiap minggu kami selalu adakan penjangingan supaya memang anak jalanan, gepeng dan pengemis tidak banyak berkeliaran di kota malang ini”²

² Wawancara dengan ibu Putri Lolyta (Staf bidang rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang) Pada 11 April 2018 Pukul 13.40 WIB

Dalam data Dinas Sosial menyebutkan memang jumlah angka anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2016 memang tidak terlalu banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun penanganan yang kontinyu menyebutkan bahwa angka tidak selalu merepresentasikan penanganan yang baik dari aparat pemerintah. Penanganan anak jalanan di Kota Malang memang selalu ada setiap tahunnya bahkan setiap minggunya. Berdasarkan wawancara dengan Mama Ria selaku Dewan Penasehat dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur:

“....dari segi jumlah sekarang sudah tidak banyak mas tapi kita selalu komitmen untuk memberantas anak jalanan. Setiap minggunya kita selalu adakan pengajaran edukasi di rumah belajar kami”³

Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen dari berbagai elemen untuk memberantas anak jalanan di Kota Malang ini tidak muncul dari Dinas Sosial saja namun dari Lembaga Non pemerintah pula..

³ Wawancara dengan Mama Ria (Pelaku Sosial sekaligus Penasihat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang) Pada 12 April 2018 pukul 14.15 WIB

4.5.1 Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (Jawa Timur kemanusiaan Network) adalah sebuah LSM yang bekerja pada bidang kemanusiaan. Pembentukan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melewati tiga perubahan era yang pada akhirnya dibentuk dari semangat careness beberapa orang-orang muda untuk perubahan bangsa. perawatan tidak muncul dengan sendirinya tapi itu muncul karena sayang untuk kekurangan-kekurangan kepada dalam melakukan untuk orang lain. Jaringan ini mulai dari Jaringan Relawan Kemanusiaan Jawa Timur pada tahun 1996, kemudian menjadi Jaringan Kemanusiaan Komisi Kepemudaan Malang dan disahkan di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur pada tahun 2003.

Komunitas kemanusiaan perspektif untuk mengangkat derajat dan hak kebersamaan untuk membantu orang lain dalam kisaran yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam lingkungan semakin dekat yang tidak terhitung. Dalam kasus ini, fokus utama adalah untuk mempersiapkan generasi berikut memiliki kepedulian kepada orang lain. Misi dari komunitas kemanusiaan adalah untuk membuat aktif potensi manusia untuk melakukan dengan hati dengan seluruh batas. Kemudian untuk membuat kebudayaan nasional sebagai salah satu dasar penting dalam mempertahankan sifat Pancasila dan UUD 1945. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur memiliki beberapa divisi, yaitu; ·

- **Divisi Bencana ·**
- **Pendidikan Divisi ·**
- **Divisi Sosial Budaya ·**
- **Divisi Peduli Lingkungan**

Divisi kegiatan yang dilakukan oleh JKJT tersebut merepresentasikan kepedulian Lembaga tersebut akan kemanusiaan. Kemanusiaan dan kepedulian bersama kepada masyarakat merupakan tujuan mereka dalam menjalankan misi dari jaringan kemanusiaan jawa timur tersebut. dari salah satu kegiatan yang masih dilakukan hingga saat ini bahwa Anak Jalanan menjadi *concern* utama mereka dalam masalah kemanusiaan.



BAB V

PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG PADA TAHUN 2016

Penanganan anak jalanan merupakan bukan hanya tugas dari aparat pemerintah saja, namun itu merupakan tugas dari semua elemen masyarakat. Adanya tujuan bersama Koordinasi, dan Implementasi antar aktor sangat dibutuhkan. Penanganan anak jalanan merupakan penanganan bersama. Penanganan permasalahan sosial keterlibatan aktor dapat memaksimalkan penanganan yang ada. Seperti yang ungkapkan oleh Peters dalam teori *governance* nya dalam pemilihan tujuan, Koordinasi, Implementasi serta Akuntabilitas harus dibangun dan dibuat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam sebuah upaya penanganan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penanganan masalah-masalah sosial anak jalanan.

5.1 Persamaan Visi dan Misi Instansi

Visi dan Misi merupakan sebuah acuan pedoman dalam sebuah instansi maupun perseorangan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai sebuah hasil yang ingin dicapai. Dalam perumusannya tujuan memperkirakan potensi serta prospek, hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan dan juga mengatur pengendalian dan serta evaluasi yang termuat dalam susunan Visi serta Misi.

5.1.1 Tujuan, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang

Penanganan Anak Jalanan pula mengacu pada visi dan misi serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Malang dalam bidang sosial. Pemerintah bergerak bersama Lembaga Sosial dan Swasta bersama-sama memiliki visi misi untuk penanganan Anak Jalanan dengan upaya-upaya yang dilakukan. Menurut Staf bidang Rehabilitasi Sosial Putri Lolyta, penanganan anak jalanan ini bukanlah program utama dalam dinas sosial namun dinas sosial tetap melaksanakan penanganan terhadap anak jalanan di Kota Malang karena memang sudah menjadi tanggung jawab dinas sosial dalam penanganan PMKS yang ada di Kota Malang¹.

Visi dan Misi Dinas Sosial yang mana adalah merupakan SKPD yang bertanggung jawab menangani masalah Sosial termasuk Anak Jalanan. Untuk menangani hal ini Dinas Sosial memiliki Visi yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”** Visi Dinas Sosial Kota Malang memiliki arti bahwa ingin mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat PMKS yang lebih bermartabat. Selain itu juga, dalam penanganan PMKS juga Dinas Sosial menyebutkan misinya yaitu **“Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bermasyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial”**.

Adanya visi dan misi yang fokusnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat merupakan komitmen dari pemerintah untuk dapat

¹ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 11 April 2018 pukul 13.50 WIB

mewujudkannya. Selaku pelaksana dibidang sosial maka Dinas Sosial melakukan penanganan kepada Anak Jalanan dengan berkoordinasi.

5.1.2 Tujuan, Visi dan Misi Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur

Lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penanganan Anak Jalanan dan Pemulung yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur atau yang biasa disingkat JKJT ini memiliki kegiatan sosial yang bergerak dalam bidang penanganan, pengedukasian serta pembinaan di bidang sosial. Lembaga sosial ini diketuai oleh Agustinus Tedja Bawana memiliki tujuan dalam pendirian lembaga ini, tujuannya adalah untuk membangun rasa kemanusiaan antar sesama dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial terutama membantu orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita². Dalam pelaksanaan tujuan tersebut pihak JKJT telah menjalin kerjasama dengan pemerintah yang dimana memiliki tujuan yang sama dalam penanganan Anak Jalanan. salah satu Dinas terkait yaitu dinas pendidikan yang turut membantu JKJT dalam penanganan Anak Jalanan. bentuk penanganan tersebut berupa koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pemberian dan pendaftaran anak-anak jalanan yang ingin bersekolah kembali. Hal tersebut seperti yang telah dikatakan oleh narasumber Ika Wahyu selaku Relawan dan Mantan Anjal binaan JKJT:

“....JKJT ini punya kerjasama mas dengan Dinas pendidikan terkait penanganan anak jalanan ini, kami dibantu dalam urusan kayak

² Wawancara dengan Mama Ria (Pelaku Sosial sekaligus Penasihat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang) Pada 12 April 2018 pukul 14.25 WIB

pendaftaran anak anak jalanan itu untuk kembali bisa bersekolah. Biar gak putus sekolah mas³.”

Seperti halnya juga yang dikemukakan oleh narasumber Mama Ria bahwa Dinas pendidikan membantu JKJT dalam urusan penanganan anak jalanan yang ingin dikembalikan lagi bersekolah di sekolah formal. Beliau menuturkan bahwa :

“...bentuk kerjasama dengan dinas selain dinsos kami juga bekerjasama dengan dinas pendidikan mas⁴”

Hal ini pula diamini oleh narasumber kami dari Dinas Sosial bahwa Dinas pendidikan turut berperan dalam koordinasi mengenai anak anak yang putus sekolah tersebut. Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial, JKJT dan Dinas Pendidikan merupakan sebuah hubungan yang saling melengkapi satu sama lainnya dalam penanganan anak jalanan.

5.1.3 Tujuan Visi dan Misi Bank Indonesia Malang

Pihak perusahaan juga turut berperan dalam penanganan Anak Jalanan. Dalam hal ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang kali ini merupakan Bank Sentral Republik Indonesia Kota Malang. Bank Indonesia bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemberian dana-dana bantuan terkait penanganan PMKS, bantuan yang diberikan tidak hanya untuk Anak Jalanan saja namun pemberiannya juga turut diberikan kepada semua PMKS. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber Mbak Dian selaku Staf Humas Bank Indonesia ia menyebutkan bahwa pemberian yang dilakukan oleh BI kepada dinas

³ Wawancara dengan Ika Wahyu selaku Relawan dan Mantan Anak Jalanan binaan JKJT pada 12 April 2018 pukul 14.10 WIB

⁴ Wawancara dengan Mama Ria selaku Staf Penasehat Jaringan Kemanusiaan Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 14.40 WIB

sosial terkait tanggung jawab sosial perusahaan mas yang di dedikasikan untuk program program sosial yang dinas terkait lakukan⁵. Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang yang salah satunya berbunyi “*Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten*” dalam rencana dan sasaran strategis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa salah satu sasaran dari Bank Indonesia adalah ingin menciptakan sumber daya manusia berkompoten di masa yang akan datang. Program-program sosial lah yang turut menjadikan acuan bagi Bank Indonesia untuk mendedikasikan bantuannya dalam pengembangan sumber daya manusia terkait penanganan PMKS dan penanganan PMKS Anak Jalanan.

Sasaran Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia pada tahun 2016 berfokus pada tiga sektor yaitu:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bank Indonesia pada tahun 2016

No	Nama Program	Sasaran Program	Output
1.	Pemberdayaan Pendidikan	Program akan didukung oleh 45 kantor perwakilan BI termasuk Kota Malang di seluruh Indonesia dengan tema “Dedikasi untuk Negeri”.	Untuk menciptakan Masyarakat yang lebih baik dalam pengentasan kesenjangan pendidikan di seluruh Indonesia.
2.	Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan	Dalam program yang memiliki sasaran terhadap pemberdayaan perempuan, BI memberi pelatihan kepada perempuan-	Untuk menciptakan kemandirian perempuan dalam bidang usaha

⁵ Wawancara via telephone dengan Mbak Dian selaku Staf Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Malang pada 24 April 2018 Pukul 10.20 WIB

		perempuan yang memiliki usaha mikro dan ingin mengembangkan usahanya melalui program pelatihan tersebut.	mikro
3.	Ketahanan Pangan	BI juga berperan membantu pemerintah pada program ketahanan pangan. Itu diwujudkan ke dalam 55 program Ketahanan Pangan yang dijalankan oleh 36 kantor perwakilan BI di Indonesia	Untuk membantu pemerintah dalam ketersediaan pangan Indonesia dan ketahanannya terhadap krisis pangan yang melanda terutama di daerah-daerah minim sumberdaya

Sumber: Bank Indonesia Kota Malang, periode 2016

Bank Indonesia dalam hal ini turut pula berdedikasi untuk negeri dalam hal terkait dengan permasalahan sosial, tercermin dari program tanggung jawab sosial perusahaan Bank Indonesia yang juga berkecimpung dalam bidang pemberdayaan pendidikan terutama Bantuan Sosial yang diberikan kepada Dinas Sosial dalam penanganan PMKS Anak Jalanan di Kota Malang. Dengan adanya tujuan yang sama antara pemerintah, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang dan serta Bank Indonesia melalui Program CSR nya dalam penanganan PMKS Anak Jalanan di Kota Malang. Tujuan yang sama oleh karena itu, adanya kerjasama antar aktor akan lebih memaksimalkan dan mudah dalam penanganannya. Pemilihan-pemilihan tujuan yang merupakan isu bersama dan koodinasi yang juga dilahirkan bersama oleh aktor-aktor tersebut.

5.1.3.1 Program CSR Dedikasi Untuk Negeri

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah suatu bentuk nyata kepedulian atau empati sosial serta komitmen Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu menanggapi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh warga. Melalui program sosial, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan kesepahaman masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Menurut narasumber Dian, Kontribusi yang diberikan sejak tahun 2005 tersebut, sudah menjadi dan berubah sesuai dengan perkembangannya. Lebih spesifiknya adalah PSBI kini memfokuskan pada program pemberdayaan yang memiliki tujuan pada penguatan sosial ekonomi dalam sektor rumah tangga. Bank Indonesia meyakini, bahwa sektor rumah tangga turut berperan penting dalam pilar-pilar ekonomi pembangunan secara nasional seperti halnya sektor swasta dan pemerintah. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi pada sumber daya manusia nya dapat mendukung pencapaian stabilitas ekonomi⁶.

5.2 Koordinasi dalam Penanganan Anak Jalanan

Kerjasama dalam penanganan permasalahan sosial memang sangat dibutuhkan terutama dalam penanganan PMKS. Pada penanganan Anak Jalanan Kota Malang koordinasi antara pemerintah, lembaga sosial dan Bank Indonesia sudah terjalin namun tidak terjalin secara utuh antara ketiganya. Menurut Putri lolyta, koordinasi dengan pihak lain itu sangat dibutuhkan, karena bisa membantu

⁶ Wawancara via telephone dengan Mbak Dian selaku Staf Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Malang pada 24 April 2018 Pukul 10.21 WIB

mempermudah dalam pelaksanaan teknis dilapangan dalam penanganannya.⁷ Koordinasi Jaringan kemanusiaan Jawa Timur sudah terjalin dengan Dinas Sosial sejak tahun 2010.

5.2.1 Koordinasi Antar SKPD Kota Malang

Terciptanya penanganan PMKS yang pada khususnya Anak Jalanan mengacu pada penanganan yang sesuai dengan pola interaksi antar aktor. Hal itu dilakukan dengan berbagai upaya baik berupa pembinaan langsung serta kerjasamaa dengan beberapa pihak dalam penanganannya.

a) Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penanganan Anak Jalanan. Satuan Polisi Pamong Praja membantu Dinas Sosial sebagai aktor yang membantu dalam proses penjangkaran. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin melakukan penjangkaran setiap minggunya, menurut penuturan dari Syska kristina Selaku Staf Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja:

“...kalau jadwal dari Dinas Sosial memang ada mas, Jadi, Dinas Sosial memang minta bantuan ke kita, jadi ada jadwalnya 1 minggunya sekali⁸”

Koneksi antar SKPD terutama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terjalin, Dinas Sosial selaku SKPD yang menaungi bidang kesejahteraan sosial sudah menjalankan tupoksi dan jejaring kepada SKPD yang lainnya terutama

⁷ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.10 WIB

⁸ Wawancara dengan Syska Kristina selaku Staf bidang Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 13.10 WIB

dalam penanganan Anak Jalanan ini. dalam eksekusinya narasumber bersaksi bahwa setiap kali penjaringan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dari pihak Dinas Sosial juga turut turun ke lapangan untuk melaksanakan penjaringan pihak yang diketahui oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah bapak “*ndut*” yang merupakan staf Dinas Sosial yang selalu ikut dalam patroli penjaringan Anak Jalanan setiap minggunya⁹.

b) Koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Malang

Selain Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pula hubungan antara Dinas Sosial mengenai penanganan PMKS Anak Jalanan, hubungan antara Dinas Sosial dengan Polresta Malang ini sudah terjalin sejak lama dan cukup erat terbukti menurut narasumber Okta Febri selaku Staf unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Malang ia menyebutkan bahwa hubungan Dinas Sosial dan Polresta Malang unit PPA sudah lama terjalin dibuktikan dengan penanganan selama ini yang terjadi. Unit PPA menangani anak-anak jalanan yang terlibat dalam masalah hukum, seperti anak-anak yang mencuri, merampok, terlibat narkoba dan lain sebagainya. Menurut Okta alur dalam penanganannya hanya berdasarkan koordinasi saja dan bersifat kondisional sesuai permintaan dari Dinas Sosial, pihak Polresta Malang tidak menangani Anak Jalanan dalam proses penjaringan, namun Polresta Malang hanya menangani jika anak jalanan tersebut membutuhkan bimbingan konseling dan pendisiplinan pasca penjaringan saja. Ditambah pula jika anak tersebut tersandung masalah hukum. Peran Polresta Malang

⁹ Wawancara dengan Syska Kristina selaku Staf bidang Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 13.17 WIB

juga turut penting dalam penanganan Anak Jalanan karena dibutuhkannya pihak penegak hukum jika dalam prosesnya terdapat Anak Jalanan yang terlibat masalah hukum. Dengan adanya pendisiplinan juga pasca penjaringan Anak Jalanan menjadi mudah diarahkan¹⁰.

5.2.2 Koordinasi Pemerintah Kota Malang Dengan Lembaga Sosial Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur

Pemerintah Kota Malang dalam penanganan Anak Jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang berkoordinasi dengan lembaga sosial yang menaungi penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan serta Mitigasi Bencana dan program-program sosial lainnya. Lembaga sosial ini yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. JKJT ini bergerak pada bidang Kemanusiaan, Bentuk koordinasi yang dimaksud dalam rangka pelatihan bersama kedua belah pihak. Mama Ria menjelaskan bahwa:

“.....kalo program bersama gitu kita pelatihan mas, waktu itu pernah pelatihan tata boga dan dikasi modal juga dari dinas sosial berupa gerobak, tabung elpiji. Tapi itu sekali aja mas sisanya ya kayak pelatihan bareng gitu¹¹”

Program tersebut menurutnya sering dilakukan secara bersama, jalinan antara JKJT dengan Dinas Sosial juga cukup romantis. Hal ini pun dibenarkan oleh Putri lolyta

¹⁰ Wawancara dengan Okta Febri selaku Staf Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang pada 27 April 2018 pukul.09.30 WIB

¹¹ Wawancara dengan Mama Ria selaku Staf Penasehat Jaringan Kemanusiaan Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 14.34 WIB

“.....Banyak, dik. Kalau anak jalanan itu biasanya kita sama JKJT, udah lama sama mereka kita pelatihan bareng juga sering¹²”

Pemerintah melalui Dinas Sosial memiliki tujuan dalam berkoordinasi. Koordinasi dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur membantu dalam penanganan Anak Jalanan dengan cara memberikan pelatihan bersama untuk dapat menumbuhkan kegiatan dan menumbuhkan *soft skill* dari anak-anak tersebut. Pemerintah dalam penanganan Anak Jalanan tidak dapat bergerak sendiri, dengan itu Pemerintah membutuhkan kerjasama dengan semua pihak termasuk Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dalam mencapai tujuan untuk penanganan Anak Jalanan.

Mama Ria mengungkapkan bahwa, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur juga memerlukan pemerintah dalam menjalankan dan membantu dalam penanganan kemanusiaan khususnya Anak Jalanan yang merupakan kegiatan utama dari lembaga tersebut¹³. JKJT memerlukan bantuan dan bimbingan, pendampingan dan bantuan sosial berupa barang dalam pelatihan serta bantuan yang lain nontunai dalam upaya tercapainya tujuan dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kesamaan kepentingan dalam hal penanganan Anak Jalanan antara Pemerintah dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, maka tumbuhlah sebuah kerjasama diantara keduanya.

Bentuk koordinasi Dinas Sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), Organisasi Sosial dan Organisasi Masyarakat mitra dari Dinas Sosial Kota

¹² Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 11 April 2018 pukul 13.45 WIB

¹³ Wawancara dengan Mama Ria selaku Staf Penasehat Jaringan Kemanusiaan Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 14.43 WIB

Malang sesuai dengan program yang telah dicanangkan, yaitu dengan pemberdayaan dan pembinaan organisasi dan lembaga sosial yang mengambil andil dalam penanganan PMKS.

Tabel 5.2
Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang

No	NAMA LSM/ORMAS	BIDANG KEKHUSUSAN	ALAMAT
1	Griya Baca	Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila	Jl. Basuki Rahmat II/793 Malang
2	Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur	Penanganan Anak Jalanan	Jl. Blitar No 12 Kota Malang
3	Sahabat Anak	Penanganan Anak Jalanan	Jl. Bandulan No 5 Kota Malang
4	Anak Negeri	Penanganan Anak Jalanan	Jl Bandulan Gang IV Kota Malang
5	Sadar hati	Penanganan Penderita HIV/AIDS	Jl. Menur Kota Malang
6	Lembayung Jati	Penanganan Penderita HIV/AIDS	Perum LPK I Tebo Selatan
7	WCC (Woman Crisis Centre) Titian Hati	Penanganan korban Trafficking	Jl. Tangkuban Perahu Kota Malang
8	LPA Malang	Penanganan Anak Jalanan dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Breng Kota Malang
9	YPAC (Yayasan panti anak cacat)	Penanganan Anak Penyandang Disabilitas	Jl. Tumenggung Suryo Kota Malang
10	WCC Dian Mutiara	Penanganan Korban Traficking	-

11	Bhakti Luhur	Penanganan Penyandang Disabilitas	Jl. Seruni Kota Malang
12	HWPCI (Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia)	Penanganan penyandang disabilitas	-
13	Komunitas MDI (Motor Disable Indonesia)	Penanganan Penyandang Disabilitas	-
14	PERTUNI (Persatuan tuna netra Indonesia)	Penanganan Penyandang Disabilitas	Jl. Bunga Srigading No 16 Kota Malang
15	PERTAMA (Persatuan Tuna Netra Alumni Malang)	Penanganan Penyandang Disabilitas	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Lembaga sosial yang ada sebanyak 15, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur merupakan salah satu yang bergerak dibidang penanganan Anak Jalanan di Kota Malang. Bentuk koordinasi Pemerintah Kota Malang dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dalam penanganan Anak Jalanan dilakukan setiap kali terdapat kegiatan yang ingin diadakan. Bentuk koordinasi tersebut meskipun tidak secara rutin setiap minggu ataupun bulan namun itu berlangsung secara kontinyu karena Jaringan kemanusiaan Jawa Timur merupakan mitra utama dari Dinas Sosial terkait lembaga kesejahteraan sosial (LKS)¹⁴.

Jalanan kemitraan antara pemerintah dengan lembaga sosial mempermudah dalam penanganan anak jalanan. Penanganan Anak Jalanan di

¹⁴ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 11 April 2018 pukul 13.48 WIB

Kota Malang memang merupakan tanggung jawab kedua belah pihak dan membutuhkan kepedulian yang tinggi pula dari kedua belah pihak, namun kepedulian akan rasa kemanusiaan dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur untuk dapat diberdayakan melalui program pelatihan yang secara kontinyu, hal ini dimaksudkan agar anak-anak jalanan ini memiliki keterampilan meskipun mereka kurang dari segi kognitif pendidikan. Sehingga dengan adanya keterampilan dalam bidang perbengkelan maupun tata boga memberikan mereka peluang untuk bisa mandiri dari segi finansial dan mendapatkan uang dari keterampilannya tersebut. dengan begitu anak jalanan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya.

5.2.3 Koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia Malang

Bank Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, Bank Indonesia cabang Malang merupakan salah satu perusahaan yang peduli terhadap keadaan PMKS terutama PMKS Anak Jalanan, mereka membantu penanganan berdasarkan dana hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk penanganan-penanganan sosial¹⁵. Proses pengeluaran dana tersebut adalah dengan pengajuan proposal kegiatan dari Dinas Sosial Kota Malang kepada Bank Indonesia yang setiap kegiatannya didanai dengan jumlah nominal yang bervariasi dan pemberian tersebut bersifat kontinyu¹⁶. Bank Indonesia memberikan perhatiannya terhadap penanganan sosial dari PMKS terutama untuk Anak

¹⁵ Wawancara via telephone dengan Mbak Dian selaku Staf Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Malang pada 24 April 2018 Pukul 10.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.16 WIB

Jalanan ini dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Putri menambahkan juga bahwa Dinas Sosial memang setiap tahunnya ada anggaran dari APBD namun pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak dianggarkan dalam penjalanan program, dari situlah Dinas Sosial menggalang dana dari CSR untuk pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dan biasanya juga pemberian bantuan tersebut tidak terkhusus kepada salah satu PMKS aja seperti Anak Jalanan, dalam prakteknya mereka memberikan bantuan kepada seluruh PMKS dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial¹⁷.

Tujuan Bank Indonesia Malang ini memberikan bantuan dan perhatian kepada PMKS Anak Jalanan yang merupakan kelompok yang memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak, cara berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam bentuk pemberian sumbangan dana hibah untuk kemajuan program dari Dinas Sosial tersebut¹⁸. Keterlibatan BI dalam pemberian bantuan ke Dinas Sosial memberikan jalanan kemudahan bagi dinas dalam hal anggaran, karena dinas dengan begitu tidak hanya mengandalkan APBD saja namun bantuan dari program CSR BI ini sangat membantu, apalagi yang dimana anggaran pemerintah untuk penanganan PMKS Anak Jalanan ini juga terbatas.

Kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta ini sebaiknya juga dapat terjalin antara pihak swasta dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bukan hanya Dinas Sosial saja yang mendapatkan dana bantuan serta menjalin kemitraan. Bank Indonesia sebaiknya lebih banyak lagi menjalin hubungan dengan pihak Lembaga

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Wawancara via telephone dengan Mbak Dian selaku Staf Humas Bank Indonesia, Op.Cit

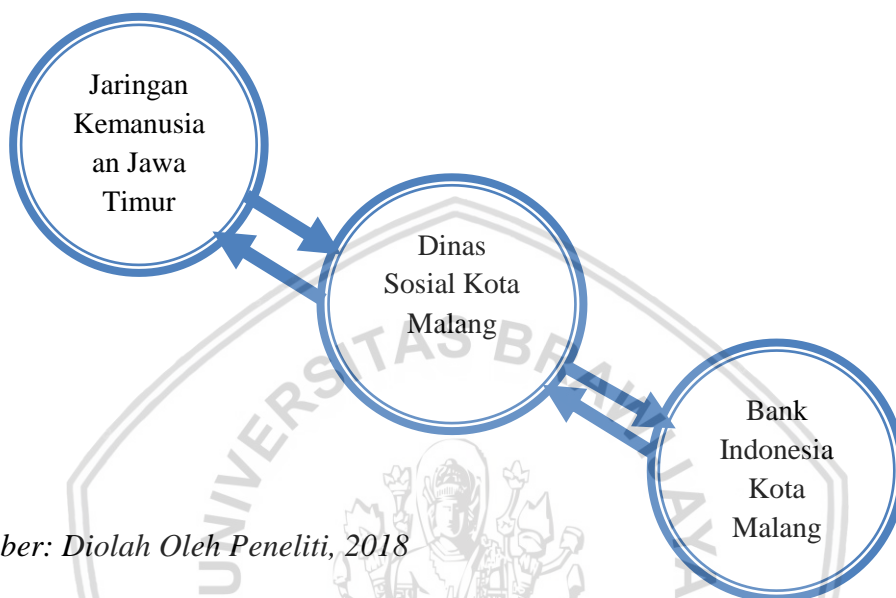
Sosial terutama dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang belum sama sekali menjalin hubungan dengan pihak Bank Indonesia dalam bentuk bantuan¹⁹.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah yang dalam hal pemberdayaan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dengan adanya dana bantuan hibah tersebut sangat membantu perkembangan dari kegiatan yang ada. Pada hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak mengandalkan dana anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Malang. Kemitraan Dinas dalam mengembangkan kegiatan program kerja terkhusus pada penanganan PMKS Anak Jalanan ini tidak terlepas dari peran swasta, karena dalam penanganan PMKS khususnya Anak Jalanan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga sosial.

Keterlibatan berbagai aktor dalam penanganan Anak Jalanan akan saling melengkapi dari keterbatasan masing-masing aktor. Peran Bank Indonesia melengkapi keterbatasan pemerintah dalam hal bantuan pendanaan untuk penanganan Anak Jalanan. Bank Indonesia melalui *tagline* tanggung jawab sosial perusahaan yaitu “dedikasi untuk negeri” dapat membantu dengan bantuan dana hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan, sesuai dengan *tagline* tersebut Bank Indonesia menginginkan bahwa program pemberdayaan untuk masyarakat melalui dinas sosial dapat berjalan meskipun dengan jumlah yang tidak besar dan tidak dapat mengcover semua kebutuhan dari pemerintah yaitu dinas sosial. Dana bantuan tersebut di berikan secara kontinyu jika dinas membutuhkan dana bantuan

¹⁹ Wawancara dengan Mama Ria selaku Staf Penasehat Jaringan Kemanusiaan Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 14.45 WIB

dari swasta terutama dengan Bank Indonesia. dalam sebuah proses koordinasi yang digambarkan didalamnya berikut adalah skema dari pola koordinasi yang terjadi antara Dinas Sosial, JKJT dan Bank Indonesia:



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018

5.3 Implementasi

Koordinasi sebagai bagian dari komitmen dari Pemerintah Kota Malang bersama dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur serta peran Bank Indonesia Malang dalam penanganan PMKS Anak Jalanan. beberapa kebijakan muncul untuk diimplementasikan dengan bentuk koordinasi.

5.3.1 Penjaringan Anak Jalanan di Kota Malang

Koordinasi Dinas Sosial dengan SKPD yang ada di Kota Malang dalam penanganan Anak Jalanan terutama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghalauan serta penjaringan dari Anak Jalanan tersebut setiap minggunya. Syska menuturkan bahwa penjaringan tersebut difokuskan pada daerah Jembatan Soekarno Hatta, Terminal Gadang dan di

Sawojajar di persimpangan bank BTN dan di Pertigaan Terminal Arjosari²⁰. Penjaringan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan biasanya pada malam hari bentuk kegiatannya yang dimulai dengan upacara/apel koordinasi dengan sesama petugas serta operasi penjaringan. Operasi yang peneliti turut hadir dan lakukan tersebut bertempat di Markas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada Minggu Tanggal 15 April 2018 mulai Pukul 20.00WIB hingga selesai pukul 23.00WIB. pada kesempatan tersebut peneliti hanya diberikan kesempatan untuk melihat proses pendataan pasca penjaringan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Proses tersebut berjalan dengan lancar dan terdapat beberapa perlawanan dari Anak Jalanan. yang dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja pun tidak hanya dari Anak Jalanan saja namun terdapat Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Dalam prosesnya tersebut pelaksanaan dari proses penjaringan tersebut dilakukan setiap minggunya pada hari Minggu di malam hari dengan alasan untuk menjaga kondisi di tempat umum tetap nyaman bagi pengguna jalan terutama trotoar di Kota Malang agar terhindar dari Anak Jalanan dan pada keesokan harinya mereka akan dibawa ke Dinas Sosial pada senin pagi.

²⁰ Wawancara dengan Syska Kristina selaku Staf bidang Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 13.16 WIB

Gambar 5.1
Operasi Penjaringan Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Pada kesempatan yang sama tim penjaringan Satuan Polisi Pamong Praja juga mendata anak-anak tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan rehabilitasi serta bimbingan. Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadikan kantornya sebagai tempat untuk penampungan sementara selama penjaringan lalu setelah itu bisa disalurkan kepada Dinas Sosial. Keberadaan anak-anak jalanan tersebut tentu saja meresahkan masyarakat karena mereka tidak seharusnya tumbuh dan hidup dijalanan. Upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut biasanya pula dilakukan jika terdapat laporan dari masyarakat yang disampaikan via akun media sosial Satuan Polisi Pamong Praja baik twitter maupun *call centre*²¹

²¹ Wawancara dengan Syska Kristina selaku Staf bidang Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Op,Cit

5.3.2 Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial yang diberikan kepada PMKS Anak Jalanan. Bantuan Sosial ini diberikan kepada lembaga sosial yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Dinas Sosial Kota Malang membantu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dalam bentuk pendanaan barang yang seperti telah disebutkan Mama Ria bahwa koneksi antara Dinas Sosial dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur sendiri terjalin dari program pelatihan bersama²². Menurut Putri :

“...untuk anggaran kita memang terbatas mas, apalagi PMKS ini buanyak to jadi kadang memang tidak bisa tertutupi semua. Tapi pasti kami usahakan untuk bisa terlaksana”

Minimnya anggaran ini membuat Dinas Sosial membagi anggaran dengan PMKS. Penanganan Anak Jalanan yang merupakan bagian dari salah satu PMKS. Dalam penanganannya memiliki tujuan dan sasaran yaitu mengembangkan Bantuan dan Perlindungan sosial kepada PMKS. Bantuan Sosial yang diberikan kepada Anak Jalanan masih kurang memenuhi tujuan tersebut. Namun dalam hal pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak jalanan sudah dilakukan secara kontinyu. Pada tahun 2016 program razia dari anak jalanan mengidentifikasi sebanyak 45 Anak Jalanan pada rentang waktu Februari-November 2016 itu hanya anak-anak yang diidentifikasi berasal dari Kota Malang saja. Untuk daerah luar malang anak-anak tersebut dikembalikan lagi kepada Dinas Sosial asal dari anak-anak tersebut.

²² Wawancara dengan Mama Ria selaku Staf Penasehat Jaringan Kemanusiaan Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 14.47 WIB

Pemberian bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Kota Malang yang secara khusus untuk penanganan Anak Jalanan belum dianggarkan secara khusus dan masih terbagi-bagi dengan PMKS lainnya. Hal ini membuat penanganan kepada Anak Jalanan kurang maksimal. Anak jalanan yang terutama binaan dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur itu kurang mendapatkan bantuan khusus yang kontinyu setiap bulan maupun tahunnya. Bantuan sendiri hanya sebatas hibah barang yang dilakukan pada kala tertentu. Seakan dalam penanganan ini dinas sosial dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur berjalan sendiri-sendiri dengan penanganannya sendiri.

Pihak Bank Indonesia Malang secara kontinyu memberikan bantuan sosial berupa dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Seperti pada program Desaku Menanti pada tahun 2016 yang juga disana terdapat keluarga dari Anak-anak Jalanan serta PMKS lainnya:

“.....Program Desaku Menanti itu ya, kayak misalnya rumah, rumahnya, dan beberapa fasilitas itu memang didanai oleh Kementerian. Kemudian kayak fasilitas rumah... apa namanya, e.. perabotan di dalam rumah, termasuk juga dengan beberapa.. kayak misalnya sembako, kemudian ada juga kayak.. e... subsidi listrik dan sebagainya itu Didanai oleh Dinas Sosial. Tetapi untuk pengembangan yang lain misalnya kita habis bikin...apa itu, musholla, ya. Nah itu yang danai dari BI dek mereka hanya membantu yang kayak fasilitas-fasilitasnya saja jadi sifatnya insidental²³”

Kepedulian Bank Indonesia dalam penanganan Anak Jalanan dengan memberikan sejumlah bantuan sosial berupa uang dan barang dalam program-program pemerintah yang meskipun itupun hanya bantuan sekunder namun sangat berarti

²³ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.20 WIB

bagi para PMKS terutama anak-anak jalanan. pemberian bantuan sosial kepada Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial mitra dari pemerintah yang disini adalah Dinas Sosial dalam penanganan Anak Jalanan terkendala dalam hal anggaran. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur kurang maksimal karena pemerintah kurang memperhatikan mitranya tersebut sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur lebih banyak menggantungkan bantuan sosial berupa barang-barang seperti baju, alat tulis, bahan bacaan dan sebagainya dari perusahaan maupun bantuan perseorangan.

Untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut Pemerintah Kota Malang dapat mengalokasikan secara khusus untuk penanganan baik rehabilitasi maupun pemberdayaan pada Anak Jalanan. dengan begitu tidak akan terbagi lagi dengan PMKS lainnya. Dalam praktiknya bahwa meskipun Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan satu kesatuan penanganan namun harus tetap jadi perhatian bagi pemerintah dalam penanganan Anak Jalanan itu sendiri. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 tentang penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa Pemerintah daerah wajib melakukan penanganan yang preventif, represif dan rehabilitatif yang disini berfokus pada konteks rehabilitatif itu sendiri. Bantuan sosial merupakan faktor penggerak utama dalam proses rehabilitatif, jika tidak ada bantuan maka proses tersebut dapat terhambat sebagai mana mestinya. Pemerintah, Lembaga Sosial dan Swasta sama-sama memiliki tanggung jawab sosial terhadap penanganan anak

jalanani ini. Bantuan sosial sangatlah penting untuk perkembangan kegiatan di JKJT maupun di Dinas Sosial dalam hal penanganan Anak Jalanan.

5.3.2.1 Program Desaku Menanti Kota Malang

Program desaku menanti adalah program penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan terpadu melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga berbasis desa. Tujuan dari program desaku menanti adalah mengembangkan model penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar hilang secara permanen dikota-kota besar. Program ini merupakan program inovasi dari program penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan yang selama ini telah dilakukan. Kota Malang sebagai pelaksana dari program ini berangkat dari Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yaitu dengan memfokuskan semua layanan daerah para gelandangan dan pengemis yang berbasis desa. Program ini melibatkan seluruh komponen di daerah seperti Pemerintah Daerah, Pengusaha (CSR), LSM dan tokoh masyarakat. Inti dari program ini adalah menciptakan keteraturan sosial melalui peningkatan kontrol sosial dari masyarakat. Yang menjadi sasaran dalam program tersebut adalah Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan. upaya untuk mengentas gepeng dan anak jalanan menjadi fokus utama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemensos bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang membuat satu Program bernama Desaku Menanti di wilayah Tlogowaru Kota Malang. Dalam program ini sebanyak 40 Kepala Keluarga(KK) eks Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan akan mendapatkan rumah serta penghidupan baru melalui program rehabilitasi sosial

dari kemensos itu. Pembangunan hunian bagi eks Gelandangan dan Pengemis serta Anak Jalanan dijalankan pada tahun 2016, tak hanya hunian saja namun mereka juga diberikan bantuan kaminan hidup, *Vocational Training* serta program usaha ekonomi kreatif (UEP) atau kelompok usaha bersama yang diharapkan agar mereka memiliki sumber pendapatan mandiri. Dalam program desaku menanti ini kajian tentang anak jalanan membuktikan bahwa penanganan anak jalanan harus berpusat pada keluarga. Tugas utama seorang Anak adalah sekolah dan bermain. Melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga diharapkan anak dapat bersekolah kembali dan memperoleh pendidikan yang baik. Banyaknya program penanganan untuk anak jalanan yang langsung di fokuskan kepada anak namun tingkat keberhasilannya rendah. Dikarenakan usia anak tersebut belum bisa menggunakan nalarnya dengan baik sehingga potensi-potensi untuk anak tersebut kembali ke jalanan juga akan muncul kembali. Melalui program desaku menanti ini fokus penanganan anak jalanan lebih di fokuskan kepada keluarga. Keluarga disini diharapkan dapat meningkatkan kualitas asuhan dan pendidikan informal dalam keluarga demi kualitas sumber daya manusia (SDM) anak-anak yang baik dimasa yang akan datang.

5.3.3 Pembelajaran serta Pelatihan Anak Jalanan

Dinas Sosial dalam penanganan Anak Jalanan yang turut pula berkoordinasi dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur memiliki program rehabilitasi serta pemberdayaan serta pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud bermacam-macam seperti pelatihan tata boga, perbengkelan dan yang

paling baru adalah pelatihan bermusik bagi Anak-anak jalanan yang sedang di rehabilitasi. Putri menuturkan:

“Dua tahun terakhir, sampai 2017 kemarin kita pelatihan musik. Latihan musik. Tapi juga ada juga selingan-selingan kalau yang kayak pelatihan dari UPT-UPT, maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, itu ada pelatihan kayak keterampilan e...tata boga, otomotif tuh masih. Masih ada bagi mereka. Ada juga kemarin...e...handycraft kalau nggak salah ya. Itu masih ada. Jadi nggak murni dari di.. kota aja dik. Tapi.. misalnya ada pelatihan di UPT mana gitu kita selalu kirimkan jika memang sedang membuka pelatihan di UPT”

Dinas sosial selain itu juga bekerjasama dengan Mitra mereka Unit Pelayanan Sosial Rehabilitasi milik Provinsi Jawa Timur yang menjadi rujukan pengiriman anak-anak jalan guna di ikutkan pelatihan-pelatihan tersebut. terdapat sepuluh UPT Pelayanan sosial yang bergerak dalam proses rehabilitasi Anak antara lain :

Tabel 5.3
UPT Rehabilitasi Sosial Anak Milik Provinsi Mitra Dinas Sosial Kota Malang

No	NAMA UPT	BIDANG KEKHUSUSAN	ALAMAT
1	UPT Pelayanan Sosial Balita Sidoarjo	Balita Terlantar	Jl. Dr. Mongonsidi No 25 Sidoarjo
2	UPT Pelayanan Sosial Anak Trenggalek	Pelayanan Sosial Anak Terlantar	Jl. J.A Suprpto No 6
3	UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo	Penanganan Anak Jalanan	Jl. Anggrek No 74 Situbondo
4	UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep	Penanganan Anak Jalanan	Jl. Halim Perdana Kusuma No 86

5	UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk	Pelayanan Sosial Anak Terlantar	Jl. Veteran No 47 Nganjuk
6	UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu	Pelayanan Sosial Anak terlantar	Jl. Trunojoyo 93 Batu
7	UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar	Penanganan Anak Jalanan	Jl. A Yani No 32 Blitar
8	UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang	Penanganan Anak Jalanan	Jl. Wahidin Sudiro
9	UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro	Penanganan Anak Jalanan	Jl. A Suprpto No 4A
10	UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan	Anak Terlantar dan Jalanan	-Jl. Ronggo Sukowati No 5 Pamekasan

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, 2018

UPT-UPT tersebut merupakan mitra kerja dari Dinas Sosial terkait penanganan Anak Jalanan, jika terdapat program-program pelatihan dari UPT tersebut maka dinas sosial biasanya mengirimkan perwakilan dari Anak yang sedang menjalankan rehabilitasi untuk mengikuti program tersebut²⁴. Selain pelatihan dari UPT itu, Anak Jalanan juga diberikan edukasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya oleh pihak lain, Putri Lolyta mengungkapkan bahwa :

“Kalau bimbingan sosial kita bisa sendiri, tapi kalau untuk bimbingan keterampilan Perbengkelan dan tata boga, karena kita nggak punya

²⁴ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.25 WIB

instruktur, kita kadang ada yang kerja sama dengan SKB, ada yang kerja sama sama kayak SMK-SMK e..apa namanya, kayak, pernah kita sama SMK 6, SMK Kartika, itu pernah²⁵”

Anak jalanan yang menjadi objek pelatihan pun tidak sembarangan dilatih untuk mendapatkan keterampilan. Putri mengungkapkan juga bahwa Dinas Sosial sebelum melakukan proses pemberdayaan sosial yang dalam hal ini adalah pelatihan keterampilan kerja, Dinas Sosial selalu mengecek umur dari Anak Jalanan tersebut jika kurang dari 14 tahun maka tidak layak untuk di berikan pelatihan kerja, biasanya mereka akan diberikan edukasi-edukasi yang lain seperti berhitung, membaca dan menggambar yang lebih ke konteks pembelajaran dasar dari anak jalanan²⁶. tidak berbeda dengan Dinas Sosial, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur juga memberikan Pembelajaran dan Pelatihan kerja bagi anak binaannya. Bagi anak-anak yang masih berusia dibawah 14 tahun juga biasanya masih diberikan pembelajaran di Rumah Belajar yang merupakan sarana untuk anak-anak tersebut belajar keterampilan membaca, berhitung dan menggambar.

²⁵ Ibid,

²⁶ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.25 WIB

Gambar 5.2
Suasana Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah Belajar Jaringan
Kemanusiaan Jawa Timur di Daerah Muharto Gg V



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Dalam pelaksanaannya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tidak mendapat kendala apapun. Respon dari anak-anak sangat antusias dalam mengikuti proses belajar tersebut. Mereka datang dari latar belakang keluarga yang berbeda ada yang ex-Anak Jalanan, Pengemis dan sebagainya. Kegiatan belajar tersebut dilaksanakan setiap hari minggu pagi pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang di berbagai kawasan rumah belajar binaan JKJT. Rumah belajar tersebut berada pada daerah asal anak-anak jalanan tersebut. seperti daerah Muharto dan Jagalan. Disisi lain Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur juga memberikan pelatihan dengan menggandeng kerjasama dengan pihak BLKI Singosari, anak jalanan tersebut dikirimkan ke balai pelatihan kerja BLKI Singosari Malang dengan tujuan untuk mendapatkan skill bekerja dalam bidang yang berbagai macam

seperti perbengkelan dan multimedia dan lain sebagainya²⁷. Ika wahyu juga menuturkan :

“...Pelatihannya banyak mas seperti apa yang di buka disana, ada anak-anak yang mau diajarkan pelatihan pasti kita kirim kesana tapi kalo tidak berminat ya ndak kita kirim mas²⁸”

Pelatihan tersebut juga tidak diadakan setiap minggu dan bersifat insidentil yaitu jika terdapat anak-anak yang ingin di fasilitasi dalam pelatihan yang mereka inginkan. Pihak JKJT juga tidak pernah memaksa anak-anak untuk dapat seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai yang tersedia. Mereka bebas memilih untuk dapat menekuni bidang-bidang yang mereka gemari. Salah satunya adalah kevin yang juga merupakan anak binaan JKJT yang saat ini menekuni bidang multimedia dan Teknologi Infomasi, Mereka difasilitasi oleh JKJT agar mereka berkembang jika menekuni bidang kegemarannya imbuh Ika Wahyu²⁹. Dalam pemilihan pelatihan tersebut memang perlu adanya perhatian khusus karena pelatihan bertujuan menciptakan *soft skill* bagi anak jalanan tersebut. jika tujuan itu tidak dijalankan semaksimal mungkin bagaimana bisa tercipta suatu keluaran yang baik dari bentuk pelatihan tersebut, yang ada hanyalah sia-sia jika tidak diperhatikan dengan benar dalam pemilihan pelatihan yang cocok seperti apa bagi setiap anak jalanan tersebut

²⁷ Wawancara dengan Ika Wahyu selaku Relawan dan Mantan Anak Jalanan binaan JKJT pada 12 April 2018 pukul 14.15 WIB

²⁸ Ibid,

²⁹ Ibid,

5.4 Akuntabilitas dan Umpan Balik

Akuntabilitas merupakan sebuah bagian yang penting dalam penjalanan program. Program tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak tertentu akan program yang sudah dijalankan. Seperti halnya dalam Pemerintahan setelah Pemerintah melakukan program kerja yang telah dirancang atau dengan kata lain setelah pengimplementasian program kerja. Dalam penanganan Anak Jalanan masih terkendala beberapa sumberdaya, baik sumberdaya anggaran maupun sumberdaya manusia. Dengan adanya kendala yang muncul membuat pemerintah harus lebih bekerja keras dan berupaya dalam perbaikan kedepannya.

Menurut Ika Wahyu ada beberapa kendala dalam penanganan anak jalanan beliau menuturkan :

“...kendala kami kebanyakan pada manusia mas, relawan kami kebanyakan adalah mahasiswa jadi jika mahasiswa itu pulang ya sudah kita menjadi terhambat dalam proses penanganan anak jalanan di JKJT ini. kalok kendala bantuan ya memang ada tapi tidak terlalu di permasalahan menurut kami rizki itu sudah diatur sama tuhan akan pasti selalu ada yang memberikan bantuan baik perseorangan atau tidak dan biasanya berupa barang mas kita terimanya³⁰”

Selanjutnya menurut penuturan dari Penasehat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yaitu Mama Ria, beliau menuturkan:

“...pemerintah kayak setengah hati mas membantu anak anak ini, mereka kalok ga di jaring biasanya datang ke kami. Mereka minta bantuan terutama kalo mereka sakit. Anak anak ini ya kalok dibilang memang susah di mengerti tapi kita sebagai orang yang tua harus memahami

³⁰ Wawancara dengan Ika Wahyu selaku Relawan dan Mantan Anak Jalanan binaan JKJT pada 12 April 2018 pukul 14.16 WIB

mereka maunya gimana ojek moro moro di jaring trus dikasik pelatihan yang mereka gak suka ya balik meneh ke jalan mereka³¹”

Pemerintah dalam penanganan Anak Jalanan ini menganggap permasalahan utama berada pada sisi anak-anak. Seakan seolah mental dari keadaan sosial bukan merupakan tanggung jawab sosial dari Dinas Sosial. Penanganan anak jalanan memang dijalankan sesuai dengan benar sesuai rencana kerja dari Dinas Sosial. Namun upaya upaya tersebut harus terus diperbaiki oleh Dinas Sosial. Menurut Putri Lolyta menuturkan bahwa kendala yang dialami Dinas Sosial saat ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan Anak Jalanan, menurutnya pula penanganan PMKS tidak sebanding dengan jumlah aparatur yang berada pada Dinas Sosial, selain itu juga jumlah anggaran yang harus di bagi kepada seluruh PMKS ini juga merupakan kendala dalam hal anggaran, menurutnya pembiayaan yang tinggi menyebabkan Dinas Sosial kurang dapat memfasilitasi penuh upaya penanganan rehabilitasinya³². Penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Malang sebagai pelaksana di bidang sosial. Capaian kerja yang dicapai atau tidaknya dengan tujuan awal penanganan PMKS dengan ini akan di pertanggungjawabkan, sebagai berikut:

³¹ Wawancara dengan Mama Ria selaku Penasihat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur pada 12 April 2018 pukul 14.30 WIB

³² Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.28 WIB

Tabel 5.4
Capaian Misi dan Sasaran I Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Sosial
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	3,30%(1400 orang)	2,10%(890 orang)	63,57%
2	Prosentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	5,39%(200 orang)	1,35%(50 orang)	25%
3	Prosentase masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial	100%	0%	0%

Sumber: LAKIP Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan target sebesar 3,30% atau 1400 Orang dan terealisasi sebesar 2,10% atau hanya sekitar 890 orang. PMKS yang dimaksud tersebut adalah semua jenis PMKS yang terbagi dalam satu anggaran. Anak Jalanan dalam hal ini secara khusus bantuan sosial secara langsung yang berasal dari Pemerintah Kota Malang belum ada. Hal ini dikarenakan dalam anggaran APBD dan misi kinerja dalam laporan akuntabilitas tidak menyebutkan anak jalanan sebagai klasifikasi khusus dalam penganggaran. Dalam Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016 pula di sebutkan bahwa pada sasaran dan

misi I tersebut dijalankan dengan cukup berhasil, karena indikator keberhasilan tersebut menyebutkan 63,57% masuk kedalam kategori cukup berhasil.

“memang kalo disini anggarannya dibagi dengan PMKS lainnya jadi tidak ada penganggaran khusus ke salah satu PMKS³³”

Tujuan terwujudnya pengembangan bantuan sosial terhadap Anak Jalanan pada tahun 2016 belum ada pencapaian sesuai dengan tujuan dalam pemenuhan dasarnya. Pemerintah menjalankan program dalam realisasi anggaran tersebut cukup baik walaupun hanya 63,57% namun jika dibandingkan pada realisasi anggaran dan capaian dua tahun sebelumnya, pada tahun 2016 capaian tersebut di nilai menurun drastis, berikut laporannya:

Tabel 5.5
Perbandingan Capaian Misi dan Sasaran I Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Sosial Tahun 2014-2016

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian
		2014	2015	Tahun 2016
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	114% dengan realisasi 0,72%(285 orang)	103,57% dengan realisasi 3,42%(1450 orang)	63,57% dengan realisasi 2,10%(890 orang)

Sumber: LAKIP Dinas Sosial Kota Malang, 2018

³³ Wawancara dengan Putri Lolyta selaku Staf bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang pada 19 April 2018 pukul 11.27 WIB

Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) setiap tahunnya menurun terutama pada tahun 2016 sangat turun drastis dalam misi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan dari capaian tersebut melalui program kerjanya. Indikator program kegiatan yang menunjang keberhasilan serta kegagalan tersebut adalah melalui program Desaku Menanti, Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dalam target dan realisasi Misi I tersebut sudah mencapai 100% namun seharusnya Pemerintah lebih memaksimalkan jumlah target dan realisasinya terutama dalam program kerja yang memiliki anggaran dana besar seperti pada program desaku menanti yang hanya menargetkan 40 pengadaan meja, kursi tamu, spons tempat tidur dengan anggaran sebesar Rp. 245,000,000 di tambah dengan pengadaan buku yang hanya berjumlah 100 buku saja³⁴. Hal ini dinilai kurang efektif dan seharusnya dapat menunjang dari prosentase pencapaian dari realisasi anggaran tahun 2016. Hal ini turut menimbulkan kesimpulan bahwa belum ada keseriusan dari Pemerintah Kota Malang untuk penanganan PMKS Anak Jalanan terbukti dari realisasi dan penyerapan anggaran yang belum maksimal. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Malang di bidang sosial:

³⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016

Tabel 5.6
Capaian Misi I dan Sasaran II Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Sosial
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	0,35%(150 orang)	0,35%(150 orang)	100%
2	Prosentase PMKS yang mendapat Pelatihan Keterampilan	0,94%(400 orang)	0,78%(330 orang)	82,50%
3	Prosentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial	0,47%(200 orang)	0,54%(230 orang)	115%

Sumber: LAKIP Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Dari tabel diatas menyebutkan bahwa realisasi kinerja Pemerintah melalui Dinas Sosial cukup baik terutama bagi PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial dan bantuan sarana dan prasarana sosial yang sudah mencapai 100% bahkan 115% hal tersebut juga tidak akan terwujud jika program-program kinerja Dinas Sosial tidak dijalankan dengan baik. Program kerja yang dijalankan dalam tujuan dan misi diatas adalah program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Pada salah satu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial tersebut menyebutkan kegiatan kerja yaitu Operasional kegiatan razia pada PMKS jalanan termasuk Anak Jalanan didalamnya, dalam implementasinya target dan realisasi sudah mencapai 100% yaitu dalam bentuk kegiatan sebanyak 160kali razia yang

dilakukan oleh dinas sosial, namun sebaiknya pemerintah lebih memaksimalkan kegiatan tersebut karena dari total penganggaran yang di targetkan sebesar Rp 209,580,000 hanya terealisasi sebesar Rp. 167,519,500-, sebaiknya pemerintah menargetkan jumlah kegiatan yang lebih banyak dengan harapan realisasinya pun akan semakin banyak pula. Selain itu penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pembinaan bimbingan PMKS anak jalanan melalui pelatihan keterampilan musik, servis sepeda motor dan sebagainya cukup terserap dengan baik dengan kisaran rata-rata serapan anggaran 75%³⁵.

5.5 Faktor Pendukung

Adanya faktor pendukung dalam penanganan Anak Jalanan Kota Malang merupakan salah satu agar untuk meraih keberhasilan dalam implementasi penanganannya. Dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan ada beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung proses implementasi:

a) Pola Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang antara Dinas Sosial dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mempermudah pelaksanaan teknis dari penanganan serta pemberdayaan dari Anak Jalanan melalui program pelatihan bersama. Selain itu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur juga merupakan Mitra Lembaga Kesejahteraan Sosial jadi koneksi antara keduanya juga baik dalam

³⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016

proses penanganan bersamanya. Namun dalam bidang pelatihan dan pemberdayaan kedua belah pihak masing-masing seakan berjalan sendiri-sendiri tidak ada imbal balik dari keduanya dalam proses penanganan berlangsung. Pola koordinasi yang baik tercermin dari koneksi antar SKPD di Kota Malang dalam penanganan anak jalanan. Dinas Sosial bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Malang bersinergi dalam penanganan anak jalanan itu sendiri.

b) Tujuan yang sejalan antara Pemerintah, Lembaga Sosial dan Swasta

Dalam proses berjalannya penanganan Anak Jalanan, ketiga elemen tersebut menjalankan fungsinya masing-masing dalam proses penanganan anak jalanan. Tujuan dari ketiga elemen tersebut adalah ingin mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama Anak Jalanan. Ketiga pihak tersebut ingin mengentas salah satu masalah perkotaan yang melanda terutama di Kota Malang yaitu dalam upaya penanganan Anak Jalanan. Upaya penanganannya dari Dinas Sosial diadakan sesuai penanganan dalam pasal 1 peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dalam upaya preventif, represif dan rehabilitatif. Sedangkan dari Jaringan Kemanusiaan dalam penanganannya lebih kepada upaya penanganan yang berlandaskan kemanusiaan upayanya adalah pemberian pendidikan melalui rumah belajar dan program pelatihan bersama BLKI Singosari. Lalu Bank Indonesia yang merupakan pihak swasta menjalankan program dukungan terhadap penanganan anak jalanan ini melalui program CSR mereka "Dedikasi untuk Negeri" yang bergerak di bidang pertanggungjawaban

sosial dari Bank Indonesia dalam bidang pendidikan bagi anak-anak jalanan yang tersalurkan melalui Dinas Sosial.

5.6 Faktor Penghambat

Penanganan anak jalanan di Kota Malang tentu saja menemui beberapa hambatan, yang dalam hal ini dengan adanya faktor penghambat tersebut membuat pencapaian tujuan memiliki kesulitan untuk dicapai dalam proses implementasinya. Adapun faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Malang belum maksimal

Salah satu faktor penghambat dalam penanganan Anak Jalanan di Kota Malang yaitu, minimnya bantuan sosial yang diberikan kepada Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Dinas Sosial seharusnya lebih memperhatikan mitra kerjanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan sosial merupakan faktor penting dalam menjalankan program-program penanganan Anak Jalanan, terutama bagi JKJT yang memiliki Rumah Belajar yang membutuhkan bantuan dalam bentuk barang-barang operasional pembelajaran yang selama ini sangat minim fasilitas bahan pengajaran.

- b. Kurangnya kerjasama antara LKS Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dengan pihak Swasta.

Hubungan antara Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dengan Bank Indonesia belum terjalin. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh JKJT kebanyakan hanya pada Pemerintah saja. Hal ini perlu adanya perhatian bagi

kedua belah pihak agar pihak swasta dapat terbuka dalam memberikan bantuannya langsung kepada lembaga sosial terutama Jaringan kemanusiaan Jawa Timur. Agar tercipta koneksi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan operasional penanganan Anak-Anak Jalanan di Kota Malang terutama bagi anak-anak binaan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur.

c. Penanganan Sinergitas yang kurang

Meskipun dalam visi Dinas Sosial dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ini sudah sejalan namun dalam implementasi dilapangan, Pemerintah Dinas Sosial kurang adanya penanganan yang sinergis dalam bentuk kegiatan bersama. Dalam mitra kerja Dinas Sosial biasanya Dinas mengajak mitranya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah namun intensitas belum banyak. Terkait dengan penanganannya juga dinas sosial dengan JKJT belum melaksanakan proses penanganan bersama yang berkesinambungan hanya sebatas pelatihan bersama, selebihnya merupakan kegiatan masing-masing dari kedua belah pihak.

d. Realisasi Indikator Kinerja yang sangat tidak maksimal

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016 menyebutkan bahwa realisasi pada Misi dan Tujuan I belum menunjukkan hasil yang baik seharusnya dari program-program kerja yang sudah diatur dalam rancangan program tersebut dapat terealisasikan dengan baik hal tersebut tercemin dari capaian pada PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hanya mencapai 63,57%. Pemerintah seharusnya memaksimalkan anggaran yang ada dengan penyerapan yang maksimal terutama

bagi penyelenggara bidang sosial yaitu Dinas Sosial. Dalam implementasi tersebut juga terjadi penurunan di setiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi evaluasi dan perhatian khusus terutama bagi Pemerintah agar selalu meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran berikutnya agar dapat tercapainya target realisasi pada tahun 2018 sesuai dengan rencana strategis Dinas Sosial Kota Malang 2014-2018 yaitu sebesar 13,84% atau sekitar 58500 orang.



BAB VI

PENUTUP

Peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai penyempurna penelitian ini yang dihasilkan pelaksanaan penelitian. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab I. Selain kesimpulan pada bab ini peneliti juga akan memaparkan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Malang, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dan Bank Indonesia Malang serta masyarakat. Rekomendasi merupakan solusi yang peneliti tawarkan kepada pihak-pihak terkait tersebut mengenai penanganan Anak Jalanan di Kota Malang. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberi informasi dan pandangan yang baru yang dapat menjadi pertimbangan pada pihak terkait untuk penanganan Anak Jalanan di Kota Malang maupun daerah lain.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pertanyaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Malang tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- A. Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang yang diawali dengan adanya persamaan Visi Misi dan Tujuan antara pemerintah dengan lembaga sosial. Dalam hal ini penanganan Anak Jalanan yang termasuk pada bidang sosial dinaungi oleh dinas sosial. Dinas Sosial dalam penanganannya memiliki sasaran dan tujuan yang selaras dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa

Timur yang merupakan lembaga sosial yang bergerak pada bidang pemberdayaan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Malang dengan kegiatannya yang berjalan hingga saat ini adalah pengajaran terhadap Anak Jalanan melalui program Rumah Belajar JKJT dan Pelatihan Kerja yang bekerjasama dengan BLKI Singosari. Tujuan yang sama juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia Malang melalui programnya “Dedikasi Untuk Negeri” yang implementasinya pemberian dana hibah tersebut guna memberdayakan PMKS terutama Anak Jalanan sebagai tujuan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

- B. Koordinasi atau kerjasama dalam penanganan Anak Jalanan dari koordinasi antar SKPD yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Malang dalam penanganannya. Di sisi lain terdapat Koordinasi yang dilakukan Pemerintah dengan lembaga sosial yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur terkait penanganan Anak Jalanan. JKJT merupakan mitra dari Dinas Sosial yang menjadikan proses koordinasi tersebut sudah terjalin. Di lain hal ada proses koordinasi yang terjadi antara pihak swasta yaitu Bank Indonesia yang memiliki koneksi dengan pihak Pemerintah selaku aktor dalam penanganan PMKS Anak Jalanan. Dalam koordinasi ini memperjelas peran masing-masing aktor bahwa aktor pemerintah sudah berintegrasi dalam perannya menangani anak jalanan melalui beberapa SKPD yang turut membantu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Malang. Proses penjangkaran hingga rehabilitasi semua melibatkan aktor tersebut. di sisi lain peran swasta disini kurang

dominan karena sebatas pemberian dana hibah saja yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia dalam membantu Pemerintah melalui Dinas Sosial dalam menjalankan program-program dengan bantuan sosial tersebut. Koordinasi antar pihak swasta yaitu Bank Indonesia dengan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur belum terjalin sama sekali dan membutuhkan peran-peran khusus dari kedua belah pihak untuk dapat saling menjalin hubungan agar penanganan Anak Jalanan lebih maksimal lagi.

C. Implementasi, dalam proses implementasi Dinas Sosial Kota Malang melakukan Penjaringan yang melibatkan SKPD tersebut lalu pihak Pemerintah akan melakukan proses pendataan serta rehabilitasi. Implementasi lainnya Pemerintah juga melakukan Pelatihan Kerja bagi anak-anak yang memenuhi kriteria yang sudah Dinas Sosial tetapkan agar penanganan Anak Jalanan bisa maksimal. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur adalah pemberian edukasi dalam ruang belajar di Rumah Belajar binaan JKJT yang berada di daerah Muharto dan Jagalan Malang. Mereka yang diberikan edukasi di rumah belajar rata-rata merupakan anak-anak yang belum berusia 14 tahun dan masih harus mengenyam pendidikan dasar. Sarana yang diberikan kepada anak-anak tersebut guna dapat menumbuhkan kecerdasan bagi anak-anak tersebut. Sedangkan bagi anak-anak yang berusia di atas 14 tahun mereka di bina tidak melalui Rumah Belajar namun dengan pelatihan-pelatihan kerja yang JKJT disini bekerjasama dengan pihak BLKI Singosari Malang. Sedangkan itu terdapat proses Implementasi lainnya

berupa bantuan-bantuan sosial yang dibrikan kepada Pemerintah dan Lembaga Sosial yang disini Pemerintah selaku Mitra dari JKJT sudah memberikan perhatiannya kepada lembaga sosial tersebut dalam bentuk pelatihan bersama dan pemberian bantuan berupa barang. Hal tersebut kurang maksimal karena pendanaan yang masih terbatas dari pihak Pemerintah untuk dapat berbagi kesemua mitranya terutama JKJT. Di sisi lain pihak swasta juga memberikan pendanaan dalam implementasinya berupa pendanaan uang yang bersifat mendukung program-program dari pemerintah, hal tersebut dirasa kurang maksimal karena Pihak swasta belum secara terbuka menjalin hubungan dengan pihak lembaga sosial terutama Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang sama sama memiliki tujuan dalam penanganan PMKS Anak Jalanan.

- D. Pertanggungjawaban Penanganan Anak Jalanan perlu dievaluasi dikarenakan tidak transparannya pihak Pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan transparansi anggaran dana CSR dan realisasi APBD pada tahun 2016. Terbukti bahwa JKJT selama ini merasa kurang dalam perhatiannya dari pemerintah dan swasta. Perbaikan ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar aktor. Dan diharapkan menciptakan dan menjalin hubungan yang lebih erat kedepannya antara aktor Pemerintah, Lembaga Sosial dan Swasta. Peneliti rasa juga penanganan Anak Jalanan ini semata-mata hanya untuk mengurangi jumlah dan angka anak jalanan. namun mengorbankan hubungan relasi antara pihak-pihak terkait. Penanganan yang baik adalah penanganan yang harus memiliki timbal

balik antar aktor didalamnya. *Good Governance* tercipta jika penanganan tersebut sudah terhubung satu sama lain antar aktornya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti rasa masih sangat jauh terciptanya sebuah tata kelola pemerintahan yang *Good Governance*.

- E. Faktor Pendukung yaitu Pola Koordinasi dan Tujuan yang sejalan antara Pemerintah, Lembaga Sosial dan Swasta turut mendukung keberlangsungan penanganan Anak Jalanan. dalam proses penanganan anak jalanan, ketiga elemen tersebut sudah menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama pada Anak Jalanan.
- F. Faktor Penghambat yaitu bantuan sosial dari pemerintah kota malang yang belum maksimal, kurangnya kerjasama antara LKS JKJT dengan pihak swasta, sinergitas penanganan yang kurang, realisasi indikator kinerja yang belum maksimal merupakan hambatan-hambatan yang sangat diharapkan dapat menjadikan suatu perbaikan dari berbagai pihak untuk dapat memperbaiki dari sistem penanganan yang sudah ada saat ini menjadi lebih baik lagi.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini ditujukan memberikan saran dan solusi mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pada khususnya pada Anak Jalanan, sebagai berikut:

- a. Dalam penanganan Anak Jalanan Pemerintah Kota Malang dapat menganggarkan dana APBD secara khusus terhadap penanganan yang dalam satu kesatuan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2013. Karena selama ini anggaran penanganan menjadi satu dengan PMKS lainnya sehingga terkesan agak membingungkan dalam pengalokasiannya serta ketidakmasimalan dalam penanganannya
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Dinas sosial merupakan Dinas yang masih tergolong baru pada tahun 2013 karena merupakan pecahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang, sebagai dinas yang baru sebagian besar pegawainya merupakan pegawai yang dimutasi ke Dinas Sosial dari Dinas sebelumnya. Terkait dengan itu di perlukan adanya upaya untuk mempersiapkan Dinas Sosial menjadi dinas yang professional. Perekrutan tenaga-tenaga professional yang menjunjung tinggi asas penanganan sosial juha harus dilakukan guna dapat membantu menjalankan program-program penanganan PMKS yang cukup banyak terutama dalam penanganan Anak Jalanan.
- c. Pembuatan kebijakan yang lebih terkhusus mengenai penanganan Anak Jalanan. penanganan yang terjadi saat ini masih terlalu umum dan belum ada keseriusan dari Dinas Sosial dalam penanganannya. Kota Malang sempat dijadikan salah satu pengembang Kota Layak Anak, salah satu Indikator Kota Layak anak adalah memiliki kebijakan mengenai Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jika kota malang sudah di

tetapkan sebagai pengembangan Kota Layak Anak seharusnya Pemerintah segera merealisasikan dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut. dengan harapan bahwa penanganan anak jalanan dan perlindungan mereka dapat lebih fokus .

- d. Meningkatkan Sinergi antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial. Permasalahan anak jalanan ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar *stakeholders*. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Lembaga Sosial guna lebih memperkuat visi dan sejalannya alur berpikir serta koordinasi serta pengimplemetasian yang juga sinergis, jika dalam bentuk koordinasi dan implementasi sudah terdapat koneksi antar aktor tersebut maka umpan balik yang diharapkan akan terwujud karena sudah terkoneksinya antar aktor tersebut. di sisi lain penanganan akan jauh lebih mudah dan akuntabilitas dari Pemerintah dimata Lembaga Sosial Masyarakat juga akan baik jika dikerjakan secara bersama.
- e. Pelatihan keterampilan yang lebih serius serta tidak hanya sebagai formalitas pertanggungjawaban program kerja. Anak jalanan merupakan sebuah objek yang cukup vital karena melibatkan generasi penerus bangsa. Penanganan yang baik pun harus dilaksanakan guna menciptakan visi dan misi Pemerintah untuk mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Oleh karena itu mulai proses penjaringan

hingga rehabilitasi harus dilakukan dengan lebih serius dan bertanggungjawab.

- f. Transparansi keterbukaan Informasi kepada publik yang harus di tingkatkan lagi. Dalam proses akademis sangat dibutuhkan data-data yang dapat mendukung berjalannya penelitian, itu bertujuan agar terciptanya sebuah pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat terutama bagi Pemerintah yang sangat membutuhkan masukan dan saran dari masyarakatnya. Di sisi lain hal ini juga bertujuan untuk menjadikan sarana evaluasi bagi Pemerintah yang selama ini menjalankan penanganan PMKS terutama Anak Jalanan di Kota Malang. Diharapkan keterbukaan informasi kepada publik dapat diperbaiki ditahun-tahun berikutnya.
- g. Perlunya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan Anak Jalanan. tidak hanya acuh terhadapnya namun juga memberikan perhatiannya. Kepedulian masyarakat akan penanganan anak jalanan perlu dilahirkan. Karena ini bukan merupakan tugas dari pemerintah saja namun melainkan ini merupakan tugas bersama yang harus di emban guna terciptanya tujuan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Anak Jalanan yang maksimal dan sinergis antar aktor didalamnya.
- h. Dalam proses persamaan Visi dan Misi, Koordinasi, Implementasi dan Umpan balik dan Akuntabilitas proses tersebut sudah dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing namun yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya keterkaitan dalam aktor tersebut. dalam kasus nya seperti Bank

Indonesia Kota Malang dan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tidak tercipta sebuah hubungan antar keduanya yang menyebabkan proses good governance itu sendiri tidak terjadi. Diharapkan kedepannya bagi JKJT dan BI Malang harus lebih saling membuka diri terhadap keduanya terutama proses penanganan Anak Jalanan.

- i. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti Anak Jalanan adalah, lebih tepatnya mengambil kasus yang tertuang dalam Perda no 9 tahun 2013 semuanya.tidak hanya kasus anak jalanan saja. Mengapa demikian karena di Kota Malang ini Anak Jalanan penanganannya lebih dijadikan satu dengan Gelandangan dan Pengemis. Dalam segi penganggaran juga menjadi satu. Oleh karena itu alangkah lebih baik meneruskan peneliti ini sesuai dengan perda tersebut dan fokus dalam tiga aspek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, BPFU-UII

Muhammad Idrus. 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga.

Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Rulam Ahmadi, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media..

Sanapiah Faisal. 2005, *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. .

Soetarso, 1996, *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung, Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan

Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

JURNAL DAN SKRIPSI

Fedri Apri, 2014, *Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta, Jurnal Ilmiah S-1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret*

Guy Peters, 2011, *Governance as Political Theory, Departement of Political Science Vol .5 No.1 Hlm 66*

Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu, Jurnal Ilmiah S-1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu*

Puji Endah Wahyu, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Jurnal Ilmiah S-1 Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Semarang*

Septian Haris Maulidhi, 2016, *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang, Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*

DOKUMEN

APBD Bidang Sosial Pemerintah Kota Malang Kota Malang

Brosur Dinas Sosial Kota Malang

Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Malang

Daftar UPT Rehabilitasi Sosial Anak Milik Provinsi Mitra Dinas Sosial Kota Malang

Kementerian Sosial RI, 2012, *Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia 2011*, Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Hlm 41

Kementerian Sosial RI, 2013, *Buku Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*, RI, Hlm 7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang pada tahun 2014-2018

Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kota Malang Pada tahun 2016

Rekapitulasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bank Indonesia pada tahun 2016

WEB

Data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 diakses <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> pada 1 Februari 2018, Pukul 15.17 WIB

Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial diakses <http://www.kemosos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p> pada 17 januari 2018, pukul 12.11 WIB

Mensos Kembali Deklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/27/09421611/mensos.kembali.deklarasikan.indonesia.bebas.anak.jalanan.2017> diakses pada tgl 20 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB

The United Nations Children's Emergency Fund Indonesia, https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf terakhir diakses pada 18 Januari 2018 Pukul 14.34 WIB

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Nunang selaku Wakil Ketua bidang LKS Dinas Sosial Kota Malang pada 8 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Putri Lolyta Dian Sari selaku Staff Dinas Sosial Kota Malang, Pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.45 WIB

Wawancara dengan Mama Ria (Pelaku Sosial sekaligus Penasihat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang) Pada 12 April 2018 pukul 14.15 WIB

Wawancara dengan Ika Wahyu selaku Relawan dan Mantan Anak Jalanan binaan JKJT pada 12 April 2018 pukul 14.10 WIB

Wawancara via telephone dengan Mbak Dian selaku Staf Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Malang pada 24 April 2018 Pukul 10.20 WIB

Wawancara dengan Syska Kristina selaku Staf bidang Pengelola Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada 12 April 2018 pukul 13.10 WIB

Wawancara dengan Okta Febri selaku Staf Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang pada 27 April 2018 pukul.09.30 WIB

